

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI

NOMOR HK.02.02.17B.12.25.154 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI

TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Kediri tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KEDIRI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI KEDIRI TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Kediri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Kediri memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Kediri untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Kediri dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Kediri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA BALAI POM DI KEDIRI,



WINANTO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia aman, bermutu serta bermanfaat bagi Masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM memegang fungsi strategis dalam sistem kesehatan Nasional melalui pengawasan yang ketat terhadap keamanan, mutu dan efikasi produk sebelum beredar. Upaya ini tidak hanya melindungi Masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas obat dan makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM Di Kediri ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM. Secara Teknis, Balai POM Di Kediri di bina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

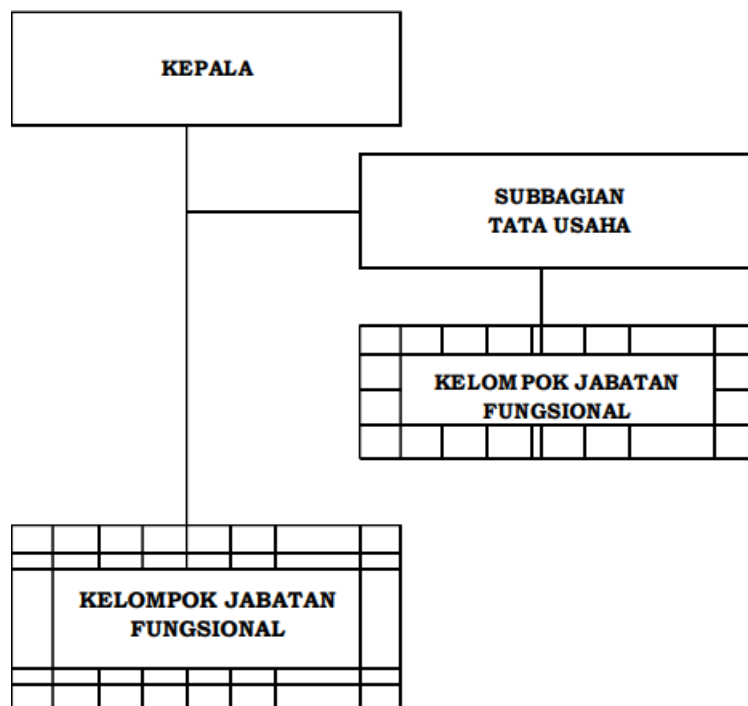
Balai POM memiliki tugas melaksanakan fungsi teknis operasional dibidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perubahan regulasi terbaru semakin menegaskan peran Balai POM dalam mendukung efektifitas pengawasan serta memperkuat tata Kelola organisasi sesuai kebijakan Badan POM.

Balai POM di Kediri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berikut struktur organisasi Balai POM di Kediri :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT BPOM

1. Kepala Balai POM

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai POM di Kediri dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

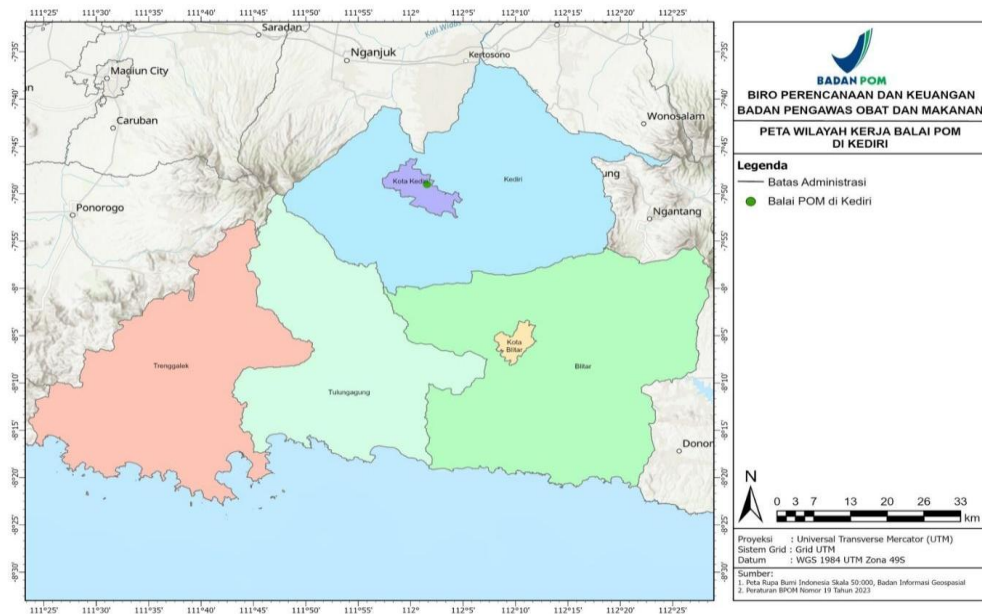
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 tahun 2023, jabatan fungsional adalah sekumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional. Pelayanan fungsional ini didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di Balai POM Kediri sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
- b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- c. Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN
- d. Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur
- e. Jabatan Fungsional Perencana
- f. Jabatan Fungsional Penata Laksana barang

Balai POM di Kediri memiliki wilayah kerja yang meliputi 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Wilayah kerja tersebut memiliki luas 5.021,37 km² dengan jumlah penduduk sekitar 5.265.100 jiwa (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri).



Gambar 1.2 Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

Berdasarkan Gambar 1.2 tersebut, cakupan wilayah kerja UPT Balai POM di Kediri yang luas terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa. Dari lokasi kantor Balai POM di Kediri menuju wilayah kerjanya dapat menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Trenggalek yaitu $\pm$ 4 jam perjalanan darat.

Tabel 1.1 Tabel Jarak Tempuh ke Wilayah Kerja

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Waktu Tempuh (jam)*
1	Kabupaten Trenggalek	jam	4
2	Kabupaten Tulungagung	jam	3
3	Kabupaten Blitar	jam	3
4	Kabupaten Kediri	jam	2
5	Kota Kediri	jam	0,5
6	Kota Blitar	jam	2

Penguatan kelembagaan BPOM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sejalan dengan hal tersebut, Balai POM di Kediri memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, baik pada sarana produksi maupun distribusi/peredaran di wilayah kerjanya. Saat ini, terdapat 7.912 sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta pangan olahan yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Kediri. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab Balai POM di Kediri dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta memastikan seluruh produk yang beredar aman, bermanfaat, dan bermutu. Jumlah sarana produksi di Balai POM di Kediri (data per 1 Januari 2025) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Sarana Produksi di Balai POM di Kediri

Wilayah	Pangan BPOM MD	Pangan PIRT	Kosmetik	OT	Obat
Kabupaten Trenggalek	3	111	0	0	0
Kabupaten Tulungagung	68	1108	1	1	0
Kabupaten Blitar	18	1445	0	2	0
Kabupaten Kediri	39	1750	1	4	0
Kota Kediri	13	528	2	3	1
Kota Blitar	3	682	0	0	0
Total	144	5624	4	10	1

Jumlah sarana distribusi di Balai POM di Kediri berdasarkan Laporan Tahunan Balai POM di Kediri tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Sarana Distribusi di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

Wilayah	Kab. Trenggalek	Kab. Tulungagung	Kab. Blitar	Kab. Kediri	Kota Kediri	Kota Blitar
PBF	0	1	0	3	15	1
Apotek	67	149	140	157	127	40
Toko Obat	22	35	13	10	10	8
Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	1	1	1	1
Rumah Sakit	3	13	8	11	12	6
Puskesmas	22	31	24	37	9	3
Klinik	19	34	23	37	26	10
Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	0	0	0	0	0	0
Obat Tradisional	12	33	27	27	28	26
Suplemen Kesehatan	56	166	116	165	109	51
Kosmetik	22	37	38	38	28	18
Penotifikasi Kosmetika	0	0	0	0	0	0
Total	224	500	390	486	364	164

Berdasarkan data BPS dalam terbitan “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024”, jumlah Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri adalah 3.363 sekolah dasar dengan jumlah murid 428.493 siswa. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) serta jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 740 sekolah dengan jumlah murid 236.434 siswa. Berikut tabel sebaran Jumlah Sekolah serta Jumlah Murid Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) menurut Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kediri :

Tabel 1.4 Jumlah Sekolah di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah SekolahD asar (Negeri & Swasta)	Jumlah Murid Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta)	Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama
Balai POM di Kediri					
1	Kabupaten Trenggalek	561	55.663	114	29.328
2	Kabupaten Tulungagung	759	89.050	148	49.582
3	Kabupaten Blitar	862	101.598	176	51.345
4	Kabupaten Kediri	951	139.211	232	75.038
5	Kota Kediri	158	30.200	44	19.711
6	Kota Blitar	72	12.771	26	11.430
TOTAL		3.363	428.493	740	236.434

Hal ini merupakan tantangan besar bagi Balai POM di Kediri untuk melindungi masyarakat dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah, oleh karena itu perlu strategi untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM

antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat sebagai konsumen agar dapat melindungi diri dan keluarganya dari risiko produk yang tidak sesuai ketentuan yang membahayakan kesehatan.

1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Kediri Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai POM di Kediri. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Capaian Kinerja Balai POM di Kediri Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
Stakeholders Perspective															
SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri															
IKSK 1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80	95.28	117.92	95.00	92.45	97.32	95.00	91.18	95.98	96.00	88.72	92.42	96.50	98.52	102.09
IKSK 2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	90.91	116.55	91.00	95.83	105.31	92.00	95.00	103.26	93.00	93.33	100.35	94.00	88.52	94.17
IKSK 3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.80	94.59	117.07	94.50	81.97	86.74	95.50	90.20	94.45	96.00	86.79	90.41	96.50	92.00	95.34
IKSK 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50	89.66	179.32	88.50	91.30	103.16	89.50	80.95	90.45	90.50	94.12	104.00	94.12	95.24	101.19
IKSK 5 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	80.00	88.89	85.00	69.57	81.85
SK 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri															
IKSK 6 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	90.97	104.56	91.00	88.28	97.01	92.00	92.37	100.40	94.00	89.99	95.73	95.00	100.00	105.26
IKSK 7 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil	53.80	58.67	109.05	62.00	68.92	111.16	69.00	72.97	105.75	77.00	80.00	103.90	85.00	97.50	114.71

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan															
IKSK 8 : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26	100.00	96.55	96.55	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
IKSK 9 : Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	50	108.70	55.00	50.00	90.91	60.00	56.58	94.30	65.00	61.04	93.91	70.00	62.03	88.61
IKSK 10 : Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	-	-	-	60.00	59.18	98.63	63.00	66.52	105.59	66.00	63.08	95.58	68.00	71.50	105.15
IKSK 11 : Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.55	3.88	109.30
IKSK 12 : Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77.00	100.00	129.87	79.00	100.00	126.60	86.70	100.00	115.34
IKSK 13 : Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00	98.17	103.34

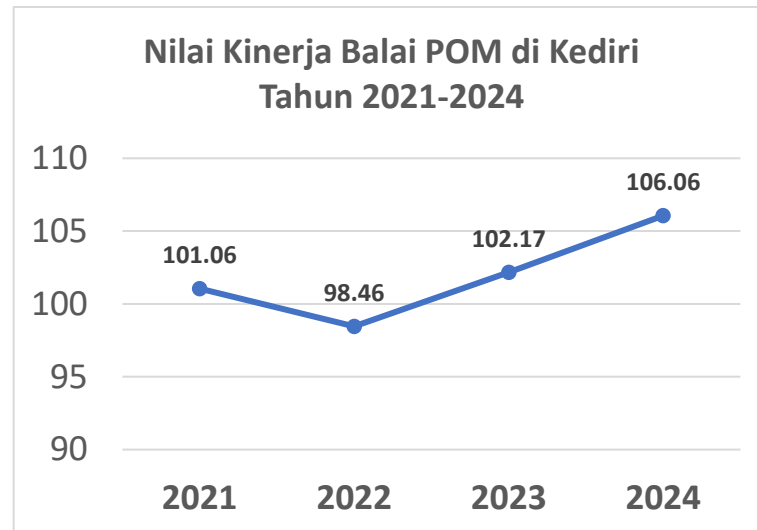
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
SK 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri															
IKSK 14 : Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.31	95.73	107.19	94.50	92.74	98.14	95.40	93.27	97.77	96.40	91.93	95.36	92.80	93.74	101.01
IKSK 15 : Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.00	100.00
IKSK 16 : Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	100.00
IKSK 17 : Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	100.00
Internal Process Perspective															
SK 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri															
IKSK 18 : Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	51.67	103.34	50.00	50.00	100.00
IKSK 19 : Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
SK 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri															
IKSK 20 : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	64	106.67	65.00	78.57	120.88	68.00	60.63	89.16	72.00	80.00	111.11	80.00	80.00	100.00
SK 6 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 21 : Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	48.59	121.48
IKSK 22 : Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	-	-	-	2.25	2.50	111.11	2.50	3.00	120.00	3.00	3.00	100.00
SK 7 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
IKSK 23 : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.42	84.97	103.09
Learning & Growth Perspective															
SK 8 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 24 : Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.80	94.14	108.46

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
IKSK 25 : Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.11	80.74	116.83
IKSK 26 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.25	90.86	101.80
SK 9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal															
IKSK 27 : Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00	63.50	84.67
IKSK 28 : Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	80.60	73.74	91.49	82.20	75.46	91.80	77.75	77.80	100.06
IKSK 29 : Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	89.50	-	-	87.76	-	89.50	91.33	102.04
SK 10 : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKSK 30 : Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	86.18	114.91	86.20	86.39	100.22	86.30	86.75	100.52	86.40	88.22	102.11	91.52*	-	-
SK 11 : Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara akuntabel															
IKSK 31 : Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	90.00	86.03	95.59	90.60	89.97	99.30	91.80	90.20	98.26	89.13	89.79	100.74
IKSK 32 : Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	83.33	-	-	33.33	-	-	75.38	-	75.38	90.00	119.40
IKSK 33 : Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	20.00	-	-	85.00	-	-	71.81	-	86.00	83.93	97.59

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
IKSK 34 : Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	19.57	-	-	41.28	-	60.00	73.79	122.98

Jika dilihat perkembangannya selama empat tahun terakhir sejak menjadi satuan kerja mandiri, nilai Kinerja Balai POM di Kediri dalam periode 2021 - 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai POM di Kediri selalu berupaya untuk terus meningkatkan capaian kinerjanya. Berikut hasil kinerja Balai POM di Kediri tahun 2021-2024 disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 1.3 Grafik Nilai Kinerja Balai POM di Kediri Tahun 2021-2024

Selama periode renstra 2020–2024, Nilai Kinerja Balai POM di Kediri baru dilaksanakan pada tahun 2021, seiring dengan perubahan status kelembagaan dari Loka POM di Kediri sebagai Satuan kerja Mandiri. Nilai Kinerja Balai POM di Kediri tahun 2021 - 2024 menggambarkan dinamika pencapaian yang solid. Setelah mencapai nilai 101,06 di tahun 2021, terdapat sedikit penurunan di tahun 2022 (98,46), namun hal ini tidak menghentikan Balai POM di Kediri untuk bangkit dan menunjukkan peningkatan kinerja yang stabil dan positif hingga mencapai 106,06 di tahun 2024. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pengukuran kinerja yang terencana, di mana Balai POM di Kediri mengacu pada Sasaran Kinerja yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM.

Dalam penyusunan sasaran kinerja, Badan POM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Balai POM di Kediri memiliki 11 Sasaran Kinerja (SK) dan 34

Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

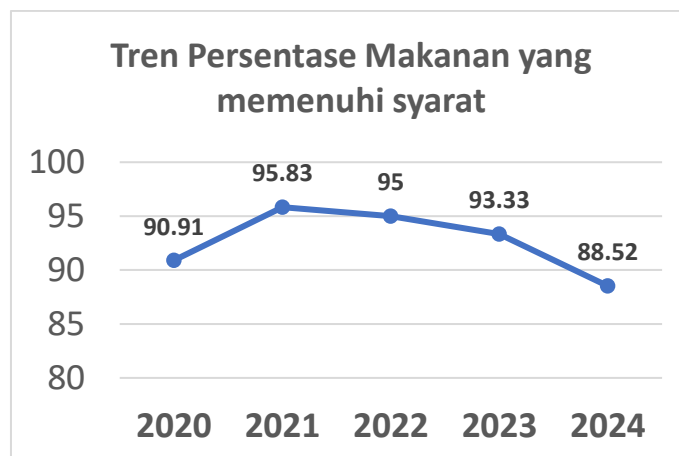
BPOM menjalankan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang menyeluruh, mencakup serangkaian proses mulai dari Standardisasi, Penilaian pra-edar (*premarket evaluation*), Pengawasan pasca-edar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, hingga Penegakan Hukum. Sebagai salah satu UPT BPOM, Balai POM di Kediri bertugas melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung di sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kegiatan inspeksi, pengambilan sampel, dan pengujian rutin. SK1 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 132,72% di tahun 2020; 98,13% di tahun 2021; 96,04% di tahun 2022; 95,21% di tahun 2023; dan 94,93% di tahun 2024. SK1 diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja pada tahun 2020-2022 dan 5 (lima) indikator kinerja pada tahun 2023-2024, sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Penurunan capaian kinerja Balai POM di Kediri dapat dikaitkan dengan kebijakan pengawasan yang diterapkan selama pandemi COVID-19 (terutama tahun 2020-2021). Pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan yang ketat mengakibatkan pemeriksaan di sarana produksi (inspeksi) Obat dan Makanan tidak dapat dilakukan secara onsite (langsung) atau harus dikurangi secara drastis. Akibatnya, teknis pemeriksaan terpaksa mengandalkan pengawasan jarak jauh secara daring. Kelonggaran dalam pengawasan fisik dan berkurangnya intensitas kehadiran petugas ini dapat menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk mengurangi tingkat kepatuhan terhadap standar Cara Produksi yang Baik (GMP) yang dampaknya berupa produk tidak memenuhi syarat baru mulai termanifestasi dan terdeteksi secara luas.



Gambar 1.4 Tren Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2020-2024

Obat yang diawasi BPOM meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan obat kuasi. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat terendah pada tahun 2023 karena tingginya temuan sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), didominasi oleh kategori TMS terkait label atau penandaan. Tingginya temuan TMS ini mencerminkan kondisi riil kualitas Obat yang beredar di masyarakat, karena metode sampling acak yang digunakan BPOM efektif dalam meningkatkan probabilitas ditemukannya sampel TMS. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang memproduksi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik telah efektif dilakukan sehingga tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meningkat.



Gambar 1.5 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi syarat tahun 2020-2024

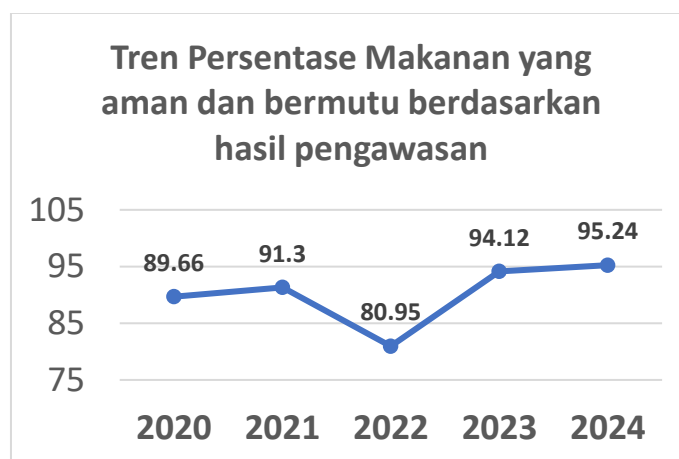
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diukur melalui hasil pengujian sampel yang sampling menggunakan metode acak yang dirancang untuk memotret kondisi riil pangan olahan di peredaran. Tren capaian Balai POM di Kediri cenderung menurun karena beberapa alasan : Banyaknya temuan sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) berasal dari pelaku usaha di luar wilayah kerja dengan kepatuhan yang bervariasi. Faktor lainnya adalah ketidaksesuaian penandaan/label karena produsen sering mengubah desain tanpa persetujuan, serta temuan produk yang TMS Uji secara kimia dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu merupakan tantangan berkelanjutan yang menuntut solusi peningkatan edukasi dan kepatuhan.



Gambar 1.6 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh dari hasil rekapitulasi hasil sampling dan penandaan serta pengujian sampel Obat *Targeted*. Sampling *Targeted* adalah metode sampling dari sebuah populasi secara terencana atas produk yang ditargetkan pada suatu populasi berdasarkan analisis risiko sesuai dengan Pedoman Sampling. Penargetan ini biasanya didasarkan pada catatan riwayat ketidakpatuhan (*track record* buruk), data pengawasan sebelumnya, atau adanya laporan/pengaduan spesifik dari masyarakat. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguji efektivitas pengawasan dan memverifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh produsen berisiko tersebut. Penurunan yang terjadi di tahun 2021 menandakan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan belum

begitu baik, juga masih banyak sarana yang belum melakukan pengelolaan yang baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan capaian menjadi 90,20 dikarenakan peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta penguatan pengawasan yang tepat sasaran. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian diakibatkan tingginya sampel yang dinyatakan TMK penandaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Tren peningkatan capaian kinerja yang dicapai melalui metode sampling *targeted* ini justru merupakan indikasi positif bahwa tingkat kepatuhan produsen yang sebelumnya berisiko tinggi telah membaik. Kemudian terjadi kenaikan capaian pada tahun 2024 sebesar 92. Hal ini disebabkan karena peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta evaluasi komprehensif terhadap strategi pengawasan yang tepat sasaran.



Gambar 1.7 Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024

Sampling bertarget dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan ataupun ditujukan untuk prioritas khusus salah satunya sampling dalam rangka pendampingan UMK. Terjadinya fluktuasi capaian pada indikator ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha pangan olahan dalam memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Adanya penurunan capaian pada tahun 2022 direspon oleh Balai POM di Kediri dengan melakukan pendampingan yang aktif kepada UMKM. Pencapaian positif Balai POM di Kediri dalam indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu ditunjang oleh tingkat kepatuhan yang tinggi dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah kerjanya sehingga besar sampel yang diproduksi oleh pelaku

usaha di wilayah kerja Balai POM Kediri memenuhi syarat. Tingginya tingkat kepatuhan ini merupakan hasil dari proses pendampingan yang efektif dilakukan oleh fungsi Sertifikasi Balai POM Kediri sehingga berhasil meningkatkan pemahaman produsen UMK dalam mengimplementasikan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, namun masih dalam kategori "Sangat Baik".



Gambar 1.8 Tren persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2020-2024

Pada tahun 2023 Balai POM di Kediri mendapatkan IKU baru untuk melakukan sampling pangan fortifikasi berupa Garam Konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. Penurunan capaian kinerja pada indikator ini diakibatkan oleh perbedaan antara lokasi sampel yang diambil dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sampling fortifikasi. Faktor kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kadar fortifikan menjadi determinan utama dalam Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Data tahun 2024 mengindikasikan adanya isu kelangkaan fortifikan Kalium Iodat (KIO₃) yang digunakan untuk fortifikasi garam, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk mengurangi jumlah fortifikan iodium yang ditambahkan guna menjaga kontinuitas produksi. Reduksi penambahan iodium tersebut mengakibatkan sejumlah produk garam dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil pengujian laboratorium.

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2) : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Publik Di Wilayah Kerja Loka POM Di Kabupaten Kediri

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Kediri sebagai UPT BPOM memiliki peran yang sama yaitu melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja. Tren rata rata capaian SK 2 Balai POM di Kediri yaitu pada 2020 sebesar 106,89%, 2021 sebesar 100,35%, 2022 sebesar 105,99%, 2023 sebesar 99,10% dan pada 2024 sebesar 104,33%. Capaian SK 2 diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku rekomendasi hasil kepentingan
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
7. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Rendahnya presentase capaian SK 2 pada tahun 2023 dipengaruhi oleh realisasi indikator kinerja berikut yang memiliki realisasi kurang dari target yang ditetapkan. Adapun indikator yang dimaksud adalah :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dari target tahun 2023 sebesar 94 diperoleh realisasi sebesar 89,99 sehingga memiliki presentase capaian sebesar 95,73%

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dari target tahun 2023 sebesar 65 diperoleh realisasi sebesar 61,04 sehingga memiliki presentase capaian sebesar 93,91%
3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dari target tahun 2023 sebesar 66 diperoleh realisasi sebesar 63,08 sehingga memiliki presentase capaian sebesar 95,58%.



Gambar 1.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020-2024

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 memperoleh nilai 90,97, mengalami penurunan pada 2021 memperoleh nilai 88,28, kemudian mengalami kenaikan di Tahun 2022 menjadi 92,37, Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 89,99 dan pada tahun 2024 naik menjadi 100. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2021-2024, pada tahun 2021 capaian sebesar 97,01% sehingga masuk kategori “Cukup”, pada tahun 2022 capaian mengalami kenaikan menjadi 100,40% dan masuk kategori “Sangat baik”, kemudian pada tahun 2023 capaian mengalami penurunan menjadi 95,73% sehingga kembali masuk kategori “Cukup”, pada tahun 2024 capain mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 105,26% dengan kategori ”Sangat Baik”.

Selama tahun 2024, telah dilakukan beberapa upaya untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain: melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan stake holder/lintas sektor terkait rekomendasi hasil pengawasan; Melaksanakan Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan; Menginventarisir Surat Masuk terkait Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu dilakukan langkah khusus antara lain :

1. Perkuatan advokasi dan sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan;
2. Melakukan peningkatan kordinasi dengan stakeholder/lintas sektor dengan membuat grup komunikasi sehingga mempermudah penyampaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi srikandi dalam melakukan inventarisir surat masuk sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring evaluasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti.



Gambar 1.10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020-2024

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan target dan diikuti dengan selaras capaian peningkatan realisasi indikator. Terbukti dari realisasi setiap tahun yang selalu melebihi dari target sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan selalu meningkat dan setiap tahun mendapat kategori 'Sangat baik'. Realisasi pada tahun 2020 memperoleh nilai 58,67; mengalami peningkatan pada tahun 2021 memperoleh nilai 68,92; mengalami kenaikan lagi di 2022 menjadi 72,97; Tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 80

dan pada tahun 2024 naik menjadi 97,50. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2024, pada tahun 2020 capaian sebesar 109,05% masuk kategori capaian “sangat Baik”, tahun 2021 capaian sebesar 111,16% sehingga masuk kategori “Sangat Baik”, pada tahun 2022 capaian menjadi 105,75% dan masuk kategori “Sangat baik”, kemudian pada tahun 2023 capaian menjadi 103,89% sehingga kembali masuk kategori “Sangat Baik”, pada tahun 2024 capain mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 114,71% dengan kategori ”Sangat Baik”.

Selama tahun 2024, telah dilakukan beberapa upaya untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain: melakukan monitoring dan evaluasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dilaksanakan setiap bulan dengan penyampaian setiap rapat bulanan dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor; melakukan pelaksanaan program ‘PIKATAN’ Penguatan Produksi Obat Dan Makanan untuk meningkatkan capaian surat tindaklanjut dari pelaku usaha.

Untuk mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu dilakukan langkah khusus antara lain :

1. Meningkatkan pendampingan dalam pembuatan capa / tindaklanjut dari hasil pemeriksaan bagi sarana produksi obat dan makanan di wilayah kota kediri dan kabupaten kediri.
2. Melakukan peningkatan kordinasi dengan stakeholder/lintas sektor dengan membuat grup komunikasi sehingga mempermudah penyampaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dan mengadakan program PIKATAN yang meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam membuat tindakan perbaikan.



Gambar 1.11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu memiliki tren capaian sesuai dengan target mulai dari tahun 2020 dan berjalan konsisten sampai dengan tahun 2024. Capaian 2020 sesuai dengan target, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 Balai POM di Kediri belum menjadi UPT satker mandiri, sehingga pelaksanaan kegiatan pada IKU ini masih disupport oleh Balai Koordinator. Pada tahun 2021 target sebesar 100, realisasi yang dicapai pada tahun tersebut adalah sebesar 96,55 sehingga persentase capaian sebesar 96,55. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021, kriteria capaian pada indikator ini adalah “Cukup”. Faktor penyebab realisasi kinerja tidak sesuai dengan target adalah pada tahun 2021 sebagian besar pelaku usaha masih dalam tahapan persiapan pemenuhan persyaratan sertifikasi sehingga target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak tercapai.

Pada tahun 2022, 2023 dan 2024 realisasi pada indikator kinerja ini sudah memenuhi target dengan kriteria “Baik”, untuk mempertahankan capaian tersebut, Balai POM di Kediri berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan menciptakan inovasi pelayanan publik yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Balai POM di Kediri aktif melakukan koordinasi dan advokasi pada lintas sektor terkait yang memiliki UMKM binaan. Hal tersebut secara langsung dapat menjaring pelaku usaha UMKM sehingga dapat meningkatkan capaian output sertifikasi Balai POM di Kediri.



Gambar 1.12 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024

Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 memperoleh nilai 50, tahun 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai dengan memperoleh nilai 50, mengalami kenaikan di 2022 menjadi 56,58, Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 61,04 dan pada tahun 2024 naik menjadi 63%. Namun apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2024 capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 capaian sebesar 108,70 sehingga masuk kategori "Sangat Baik", tahun 2021 mengalami penurunan capaian sebesar 90,90% sehingga masuk kategori "Cukup", pada tahun 2022 capaian mengalami kenaikan menjadi 94,30% dan masuk kategori "Cukup", kemudian pada tahun 2023 capaian mengalami penurunan menjadi 93,90% sehingga kembali masuk kategori "Cukup", pada tahun 2024 capaian mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 88,61% dengan kategori "Cukup". Hal ini dikarenakan adanya kenaikan target yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Selama tahun 2024, telah dilakukan beberapa upaya untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain: mengadakan program PIKATAN / Penguatan Produksi Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan pemahaman aspek CPOB, CPPOB, CPKB dan CPOTB. Kegiatan tersebut hanya dilakukan kepada pelaku usaha produksi di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Balai POM

di Kediri melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan. Dalam penetapan target pemeriksaan dilakukan berbasis risiko sehingga menyebabkan sarana dengan risiko tinggi (riwayat TMK) mendapat prioritas untuk diperiksa terlebih dahulu. Untuk mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu dilakukan langkah khusus antara lain :

1. Melaksanakan kembali program PIKATAN dengan cakupan pelaku usaha produksi yang lebih luas, karena wilayah pemeriksaan Balai POM Kediri meliputi kota Kediri, kabupaten Kediri, kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan pemahaman aspek CPOB, CPPOB, CPKB dan CPOTB kepada pelaku usaha industri obat dan makanan;
2. Menetapkan pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan dengan memperhatikan manajemen resiko.



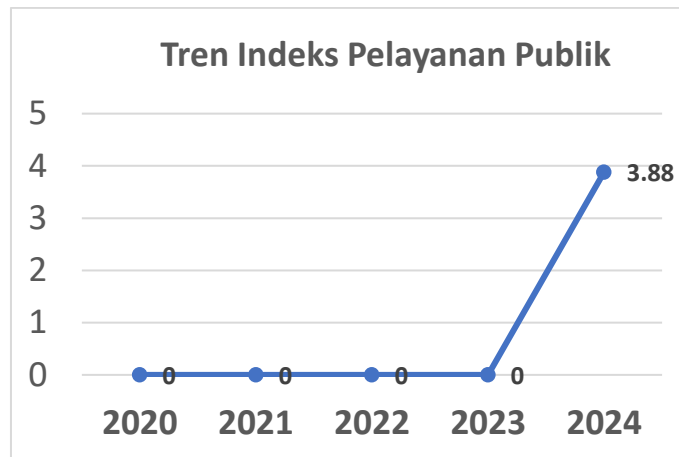
Gambar 1.13 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024

Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 belum ada indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Tahun 2021 memperoleh nilai 59,18; mengalami kenaikan di 2022 menjadi 66,52; Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 63,08 dan pada tahun 2024 naik menjadi 71,50. Hal ini senada apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2021-2024 capaian persentase sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami

fluktuatif, pada tahun 2021 capaian sebesar 98,63% sehingga masuk kategori “Cukup”, pada tahun 2022 capaian mengalami kenaikan menjadi 105,58% dan masuk kategori “Sangat Baik”, kemudian pada tahun 2023 capaian mengalami penurunan menjadi 95,57% sehingga kembali masuk kategori “Cukup”, pada tahun 2024 capaian mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 105,15% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian yang fluktuatif ini dikarenakan sebaran jenis sarana distribusi yang ada di wilayah Balai POM Kediri cukup beragam dan pada tahun 2023 untuk pemeriksaan distribusi dilakukan hingga pelosok wilayah catchment area. Terutama untuk pemeriksaan distribusi OMKA yang masih cenderung tidak memenuhi ketentuan meliputi temuan produk yang rusak, kedaluwarsa dan tanpa izin edar.

Selama tahun 2024, telah dilakukan beberapa upaya untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain : telah dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan mingguan serta monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target. Balai POM di Kediri melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan dan memprioritaskan pemeriksaan sarana distribusi di hulu berdasarkan analisis risiko agar meminimalisir temuan di hilir; Pembinaan kepada pemilik dan penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian melalui forum pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kediri dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan sehingga menjadi faktor penunjang meningkatnya persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan. Untuk mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu dilakukan langkah khusus antara lain :

1. Melaksanakan program PIKATAN dengan kepada pelaku usaha distribusi obat dan makanan di wilayah pemeriksaan Balai POM Kediri meliputi kota Kediri, kabupaten Kediri, kabupaten tulungagung, kota Blitar, kabupaten Blitar dan kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan pemahaman aspek cara distribusi obat dan makanan yang baik kepada pelaku usaha distribusi obat dan makanan;
2. Menetapkan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan dengan memperhatikan manajemen resiko.



Gambar 1.14 Indeks pelayanan publik BPOM di Kediri tahun 2020-2024

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Balai POM di Kediri baru dilaksanakan di tahun 2024, seiring dengan status kelembagaan dari Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi Balai POM di Kediri yang diresmikan pada Oktober 2023. Sehingga tren capaian indikator ini belum dapat digambarkan secara komprehensif.

Pada tahun 2024, target IPP sebesar 3,55 dengan realisasi sebesar 3,88 dan diperoleh capaian kinerja 109,30%. BPOM di Kediri berhasil melampaui target IPP yang ditetapkan dan memperoleh predikat "baik" berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Jika dilihat dari nilai tiap aspek perhitungan PEKPPP, dari enam aspek yang diukur, Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Konsultasi dan Pengaduan memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan Balai POM di Kediri telah memanfaatkan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional untuk memudahkan akses terhadap informasi pelayanan publik. Selain itu, BPOM di Kediri telah mempunyai sarana prasarana dan penanganan konsultasi dan pengaduan yang baik.

BPOM di Kediri berupaya dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan pada pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa hal yang dilakukan adalah peningkatan sarana-prasarana, bergabung dalam Mal Pelayanan Publik di wilayah kerja, serta mengembangkan inovasi khususnya terkait pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik prima dan meningkatkan nilai IPP pada periode Renstra berikutnya.



Gambar 1.15 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2020-2024

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik merupakan Indikator Kinerja yang baru diampu oleh Balai POM di Kediri pada tahun 2022. Meskipun target ditetapkan dengan tren meningkat setiap tahunnya namun capaian realisasi selama 3 tahun berturut-turut sebesar 100%.

Hal ini mencerminkan efektifitas pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM di Kediri terhadap UMKM. Monitoring Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, komunikasi yang intensif antara petugas dengan pelaku usaha untuk memudahkan petugas menganalisis kendala yang dihadapi masing-masing UMKM.

Untuk mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu dilakukan perkuatan advokasi dan koordinasi kepada lintas sektor terkait dan pelaku usaha dalam rangka peningkatan efektivitas pendampingan UMKM.



Gambar 1.16 Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota tahun 2020-2024

Indikator Indeks Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan Indikator Kinerja yang baru diampu oleh Balai POM di Kediri pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2020-2023 tidak dapat dilakukan penilaian tren capaian nya.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 95,00 dengan realisasi sebesar 98,17 sehingga menghasilkan presentase capaian sebesar 103,34% dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Hal ini menunjukan secara umum Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilakukan Balai POM di Kediri telah dilakukan dengan optimal.

Selama tahun 2024, telah dilakukan Kegiatan audiensi Kepala Balai POM di Kediri bersama Pimpinan Daerah dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan di 3 Kota/Kabupaten di wilayah kerja BPOM di Kediri yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar; Kegiatan TPPS di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri telah terlaksana sampai dengan TW III, dan BPOM di Kediri terlibat aktif hadir dalam agenda yang telah ditentukan oleh Tim TPPS; Keterlibatan aktif BPOM di Kediri seperti berperan sebagai Narasumber dalam beberapa kegiatan DAK di Kota/Kabupaten dapat meningkatkan peran pada koordinasi tata hubungan kerja; Foccus Group Discussion (FGD) terkait pengawasan obat dan makanan.

Untuk mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu dilakukan langkah khusus antara lain :

1. Meningkatkan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pengawasan obat dan makanan dan stunting di Kabupaten / Kota Wilayah kerja BPOM di Kediri;
2. Melaksanakan kegiatan audiensi Kepala Balai POM di Kediri bersama Pimpinan Daerah dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Trenggalek.
3. Meningkatkan peran aktif BPOM di Kediri dalam keterlibatan dan monev terkait pelaksanaan DAK di Kabupaten/ Kota.

3. Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kediri

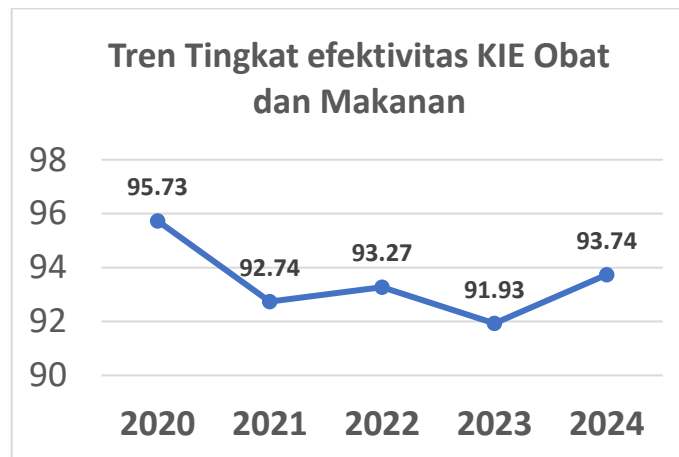
Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) berfokus pada peningkatan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) obat dan makanan kepada masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Kegiatan ini menerapkan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pencegahan risiko terkait peredaran dan penggunaan obat serta makanan yang berbahaya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih dan menggunakan obat dan makanan. Pelaksanaan KIE dilakukan melalui berbagai media dan cara, baik secara langsung melalui sosialisasi, penyuluhan, penyebaran informasi, maupun secara tidak langsung melalui media elektronik, media sosial, media luar ruang, media cetak, dll.

Peningkatan efektivitas KIE juga diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha, dalam memberdayakan kader-kader yang dapat menjadi agen perubahan. Melalui kegiatan KIE, diharapkan terjadi perubahan perilaku masyarakat menuju pola konsumsi yang aman dan sehat. Hal ini mendorong terwujudnya penerapan tiga pilar sistem pengawasan obat dan makanan yang membutuhkan peran aktif pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha.

SK3 memiliki tren yang menurun dengan capaian tahun 2020 sebesar 107,19%; di tahun 2021 sebesar 98,14%; di tahun 2022 sebesar 97,77%; di tahun 2023 sebesar 95.36%. Meskipun demikian, BPOM di Kediri selalu berupaya untuk

memperbaiki capaian kinerjanya hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan sehingga pada tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100,25%.

SK3 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman; (3) Jumlah desa pangan aman; (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.



Gambar 1.17 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020-2024

Tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Balai POM di Kediri menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Nilai efektivitas KIE tercatat sebesar 95,73 pada tahun 2020 namun menurun menjadi 92,74 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19 sehingga kegiatan KIE dilaksanakan secara daring yang menyebabkan jangkauan dan intensitas KIE berkurang. Tahun 2022 capaian kembali meningkat menjadi 93,27 yang disebabkan oleh semakin beragamnya metode dan media KIE yang digunakan, seperti pemanfaatan media sosial, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan peran kader/ duta dalam edukasi di masyarakat melalui kegiatan duta kosmetik aman. Selain itu, pada tahun 2022, aspek manfaat juga memberikan nilai besar pada pembentukan nilai tingkat efektifitas KIE. Hal ini menunjukkan KIE tepat sasaran, memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat serta makanan yang aman dan bermutu. Kemudian menurun kembali

menjadi 91,93 pada tahun 2023 namun masih dalam kategori "Baik". Balai POM di Kediri tetap konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan. Upaya peningkatan dilakukan melalui optimalisasi kanal digital, serta pengembangan materi KIE yang lebih interaktif dan mudah dipahami masyarakat, sehingga nilai efektifitas KIE pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 93,74.



Gambar 1.18 Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman tahun 2020-2024

Indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman merupakan Indikator Kinerja yang baru dimulai pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2020-2023 belum dapat digambarkan secara komprehensif. Penetapan jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman sebagai IKU baru dimulai pada tahun 2024 seiring dengan peningkatan status Loka menjadi Balai dan mendukung penyebaran informasi kepada Masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 6 sekolah dengan realisasi sebesar 6 sekolah dan diperoleh capaian kinerja 100%. BPOM di Kediri berhasil mencapai target yang ditetapkan. Setiap tahapan dalam program sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman juga telah terlaksana dengan baik mulai dari tahap advokasi, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan serta sertifikasi sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi dan dukungan lintas sektor yang efektif, melibatkan dinas kesehatan, dinas pendidikan, pemerintah daerah, serta pihak sekolah sebagai pelaksana utama di lapangan.

Partisipasi aktif dan antusiasme tinggi dari pihak sekolah menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan program ini. Sekolah dalam hal ini kader keamanan pangan secara konsisten menerapkan prinsip keamanan pangan melalui pembinaan terhadap penjual jajanan, pengawasan rutin, serta edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bergizi. Dukungan lintas sektor yang kuat juga berperan penting dalam memperluas jangkauan pembinaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat sekolah. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.



Gambar 1.19 Jumlah desa pangan aman tahun 2020-2024

Pada periode renstra 2020-2024, Desa Pangan Aman ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kediri mulai tahun 2024. Hal ini menyebabkan tren capaian indikator terkait Desa Pangan Aman ini tidak dapat digambarkan secara komprehensif. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Desa Pangan Aman pada tahun 2024 seiring dengan peningkatan status Loka POM di Kediri menjadi Balai POM di Kediri.

Pada tahun 2024, target Desa Pangan Aman yang ditetapkan sebesar 1 desa dan direalisasikan dengan melakukan intervensi pada 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Klampok, Kota Blitar. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan Desa Pangan Aman pada tahun 2024 terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sepanjang tahun 2024, yaitu :

Tabel 1.6 Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Pada Tahun 2024

No	Tahapan Kegiatan
1	Advokasi Kelembagaan
2	Pelatihan Kader Keamanan Pangan
3	Survei pre intervensi kader
4	Bimtek Komunitas
5	Survei Pre intervensi komunitas
6	Fasilitasi keamanan pangan
7	Pengawasan Keamanan Pangan
8	Monitoring dan Evaluasi
9	Lomba Desa Pangan Aman

Balai POM di Kediri berupaya dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam mendampingi Kelurahan/Desa yang diintervensi dalam menerapkan keamanan pangan melalui kegiatan pengawalan desa pangan aman.



Gambar 1.20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) tahun 2020-2024

Indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) merupakan Indikator Kinerja yang baru dimulai pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2020-2023 belum dapat digambarkan secara komprehensif. Penetapan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) sebagai IKU baru yang dimulai pada tahun 2024 seiring dengan peningkatan status dari Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi Balai POM di Kediri dan mendukung penyebaran informasi kepada Masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh di wilayah kerja.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) adalah sebesar 1 pasar dengan lokus program prioritas nasional di Kota Blitar dengan realisasi sebesar 1 pasar dan diperoleh

capaian kinerja 100%. BPOM di Kediri berhasil mencapai target yang ditetapkan. Setiap tahapan dalam program pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) juga telah dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap advokasi, survey pasar, bimtek pengelola pasar, pelatihan fasilitator PPABK, penyuluhan PPABK, kampanye keamanan pangan di pasar, dan sampling serta pengujian di pasar. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi dan dukungan lintas sektor yang efektif, melibatkan dinas kesehatan, dinas Perindustrian dan perdagangan, pemerintah daerah, FBKS, serta petugas pengelola pasar.

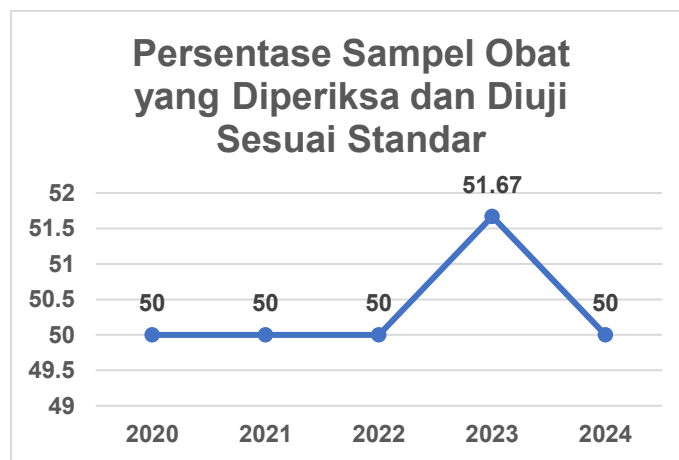
Partisipasi aktif dan antusiasme tinggi dari petugas pengelola pasar, dinas dan stakeholder terkait menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan program ini. Pengelola dan komunitas pasar secara konsisten menerapkan prinsip keamanan pangan melalui pembinaan terhadap produk-produk yang dijual di pasar, pengawasan rutin, serta edukasi kepada komunitas pasar (penjual dan pembeli) untuk memilih produk yang aman dengan Cek Klik.

Dukungan lintas sektor yang kuat juga berperan penting dalam memperluas jangkauan pembinaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat sekolah. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

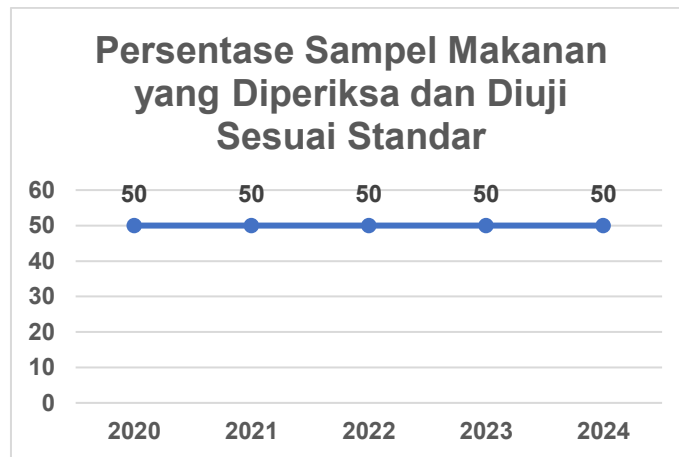
Pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan merupakan salah satu fungsi utama UPT BPOM untuk melindungi masyarakat dengan optimal yang dilakukan melalui pemastian keamanan, mutu, dan khasiat / manfaat produk yang beredar di masyarakat. Mempertimbangkan banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar dan perlu diawasi, maka disusun strategi pengawasan oleh Balai POM di Kediri dengan melakukan kegiatan sampling sesuai dengan target perencanaan yang telah disusun dan timeline yang telah ditentukan, pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan, yang kemudian dilakukan uji di laboratorium meliputi pengujian dengan parameter uji kimia dan mikrobiologi. Sampai dengan tahun 2024, Balai POM di Kediri hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan dan

belum melaksanakan pengujian sampel Obat dan Makanan secara mandiri. Adapun pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar / Balai POM yang tergabung dalam regionalisasi laboratorium region 7. SK 4 memiliki tren capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen) di 2020 sampai dengan 2022; 101,67% (seratus satu koma enam puluh tujuh persen) di tahun 2023; dan 100% (seratus persen) di tahun 2024. Capaian SK 4 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan (2) Presentase Sampel Makanan yang di Periksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 1.21 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020-2024

Berdasarkan data persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa capaian kinerja Balai POM di Kediri menunjukkan tren yang relatif stabil. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar berada pada angka 50% selama tahun 2020 dan 2022, mengalami sedikit peningkatan menjadi 51,67% pada tahun 2023, dan kembali stabil di angka 50% pada tahun 2024. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2024, pada tahun 2020 sampai dengan 2022 capaian sebesar 100%, pada tahun 2023 capaian mengalami sedikit kenaikan menjadi 103,30%, kemudian pada tahun 2024 capaian kembali menjadi 100%. Komponen penilaian untuk indikator ini terdiri dari sampling dan pengujian namun karena Balai POM di Kediri masih belum dapat melakukan pengujian secara mandiri maka capaian hanya dihitung dari komponen sampling. Pada tahun 2023 realisasi dari indikator ini lebih dari target karena pembelian sampel yang dilakukan melebihi dari target sampel tahunan.



Gambar 1.22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020-2024

Berdasarkan data persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa capaian kinerja Balai POM di Kediri menunjukkan tren yang stabil. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berada pada angka 50% selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2024 diperoleh capaian sebesar 100% yang memberikan gambaran bahwa kegiatan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman sampling.

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK 5) : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Kediri melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian kinerja selama tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 106,67% mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 120,88% dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 89,16% namun kemudian terjadi kenaikan capaian kembali pada tahun 2023 sebesar 111,11% dan terjadi penurunan di tahun 2024 sebesar 100%. Sasaran kinerja ini didukung oleh indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.



Gambar 1.23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2020-2024

Realisasi presentasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di Balai POM di Kediri dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2020 memperoleh nilai 64 dan pada tahun 2021 memperoleh nilai 78,57 yang mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 60,63, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan nilai 80, dan tahun 2024 memperoleh nilai 80.

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian karena carryover perkara pada tahun 2020 telah terselesaikan. Pada tahun 2022 realisasi presentasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai POM di Kediri nilainya cukup karena ada 2 (dua) perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya (P19) terkait dengan kewenangan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh PPNS Balai POM di Kediri tetapi dilaksanakan penggeledahan tersebut. Hal ini tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada tahun 2023 ke 2 (dua) perkara *Carry over* tersebut dilakukan SP3.

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator presentasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di Balai POM di Kediri ini

perlu dilakukan langkah khusus antara lain yaitu: meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan *Criminal Justice System (CJS)* yaitu Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 realisasinya kembali mencapai target.

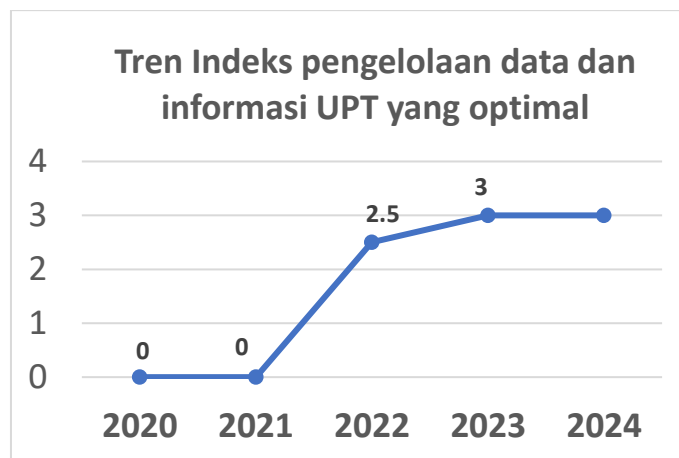
6. Sasaran Kegiatan 6 (SK 6) : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu hal penting untuk mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Kediri dalam pengawasan obat dan makanan yaitu terpenuhinya laboratorium pengujian yang sesuai standar *Good Laboratory Practice* serta pengelolaan data dan informasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang memadai sistem operasional dan teknologinya. Sasaran Kinerja Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Kediri baru menjadi target pada tahun 2022, sehingga tren realisasi capaian sasaran strategis ini dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kediri yang Optimal. SK6 mengalami tren peningkatan capaian yaitu 111,11% pada tahun 2022 dan 120% pada tahun 2023. Namun, mulai tahun 2024, Balai POM di Kediri mengampu indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, sehingga capaian SK6 diukur dengan rerata dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan capaian SK6 menjadi 100% pada tahun 2024.



Gambar 1.24 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Presentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar *GLP* baru diampu oleh Balai POM di Kediri pada tahun 2024, setelah terdapat peningkatan status dari Loka POM di Kediri menjadi Balai POM di Kediri. Sehingga, tidak dapat dilihat tren capaian realisasinya karena tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi Indikator Kinerja Presentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar *GLP* sebesar 48,59% dengan target 40%. Pemenuhan laboratorium pengujian yang sesuai standar dapat melebihi target merupakan wujud dari upaya intensif dan komitmen Balai POM di Kediri dalam memenuhi standar ruang lingkup, standar kompetensi dan standar peralatan, serta adanya monitoring dan evaluasi yang komprehensif dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai POM di Kediri, sehingga setiap kendala yang dialami dapat diselesaikan dengan baik demi tercapainya laboratorium pengujian yang memenuhi standar *GLP*.



Gambar 1.25 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Balai POM di Kediri tahun 2020-2024

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Balai POM Kediri merupakan Indikator yang baru pada tahun 2022 sehingga Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Balai POM Kediri pada tahun 2021 tidak terdapat target dan capaian. Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Balai POM Kediri merupakan perhitungan dari 2 komponen yaitu pemanfaatan Email corporate dan pemanfaatan Dashbord BOC (BPOM Operational Center).

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Balai POM di Kediri ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kediri mulai tahun 2022. Pada periode Renstra 2020–2024, Balai POM di Kediri belum memiliki target kinerja terkait indeks ini pada kurun waktu 2020-2021, sehingga tren capaian indikator ini belum dapat digambarkan secara komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Kediri dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang konsisten. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC Balai POM di Kediri.

7. Sasaran Kegiatan 7 (SK 7) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan, Badan POM menerapkan tiga pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (Sispom), yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang berbahaya. Masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem ini, karena pengawasan tidak hanya bergantung pada fungsi regulator, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai konsumen yang cerdas dan kritis. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan menjadi hal yang sangat penting.

Sasaran Kegiatan 7 (SK 7) tentang Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan menjadi salah satu fokus kinerja Balai POM di Kediri mulai tahun 2024. Sasaran ini baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 103,09%, sehingga tren capaian kinerja belum dapat digambarkan secara komprehensif. Namun, Balai POM di Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian sasaran ini, antara lain melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pemberdayaan kader keamanan pangan, serta sinergi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah, akademisi/praktisi, organisasi masyarakat, media, dll. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam mengawasi peredaran obat dan

makanan, sehingga terwujud masyarakat yang cerdas dalam memilih dan menggunakan obat dan makanan. SK 7 diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.



Gambar 1.26. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu tahun 2020-2024

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami, peduli, dan menerapkan perilaku yang mendukung keamanan dan mutu produk obat dan makanan yang dikonsumsi/digunakan. Indeks ini mencerminkan hasil dari berbagai kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penyebaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kediri. Beberapa kegiatan yang dilakukan BPOM di Kediri khususnya dalam KIE dan pemberdayaan masyarakat seperti KIE yang melibatkan akademisi, Saka POM, Kader masyarakat dalam pencegahan stunting. Selain itu, untuk menyebarluaskan informasi di bidang obat dan makanan, BPOM di Kediri telah memanfaatkan berbagai media seperti media sosial, media luar ruang (Baliho), media cetak (brosur, leaflet, spanduk), memanfaatkan WA grup kader, dan subsite BPOM di Kediri.

8. Sasaran Kegiatan 8 (SK 8) : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima, Balai POM di Kediri berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap

pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha, terutama UMKM, agar mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat produk.

Sasaran Kegiatan 8 (SK 8) tentang meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan menjadi sasaran kegiatan Balai POM di Kediri mulai tahun 2024. Sasaran ini baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 109,03%, tren capaian kinerja belum dapat digambarkan secara komprehensif. Namun, Balai POM di Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian sasaran ini, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, serta peningkatan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. SK 8 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT.



Gambar 1.27 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2020-2024

Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan Indikator Kinerja yang baru diampu oleh Balai POM di Kediri pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2020-2023 tidak dapat dilakukan penilaian tren capaian nya.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 86,80 dengan realisasi sebesar 94,14 sehingga menghasilkan presentase capaian sebesar 108,46%. Berdasarkan laporan Kinerja Tahun 2024, indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki kategori capaian “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha yang dilakukan Balai POM di Kediri telah dilakukan dengan optimal.

Selama tahun 2024, telah dilakukan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan yang Baik, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, dan Bimbingan Teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Selain Bimbingan Teknis, dilakukan pula Desk Konsultasi dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik maupun terkait pemenuhan SPA CPKB dan SPA CPOTB Bertahap. Kegiatan dilaksanakan di kantor BPOM di Kediri dengan mengundang pelaku usaha di wilayah kerja BPOM di Kediri. Selain kegiatan Sertifikasi, terdapat pula kegiatan Inspeksi berupa FGD (*Focus Group Discussion*). Sehingga Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 realisasi telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu dilakukan langkah khusus antara lain :

1. Pembinaan dan pendampingan UMKM oleh petugas Balai POM di Kediri yang kompeten sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pelaku usaha jika pelaku usaha mengalami kendala dalam proses registrasi;
2. Tersedianya jaringan dan sistem komunikasi yang baik antara personil pendamping UMKM di Balai POM di Kediri dengan pelaku usaha, antara lain melalui komunikasi Whatsapp, atau telepon maupun secara tatap muka langsung di ULPK.



Gambar 1.28 Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020-2024

BPOM di Kediri senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pengawasan tersebut tercermin melalui Indeks Kepuasan atas kinerja pengawasan obat dan makanan. Indeks ini menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Indeks Kepuasan atas kinerja pengawasan obat dan makanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kediri mulai tahun 2024. Pada periode Renstra 2020–2024, Balai POM di Kediri belum memiliki target kinerja terkait indeks ini pada kurun waktu 2020–2023, sehingga tren capaian indikator ini belum dapat digambarkan secara komprehensif.

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan terbentuk dari beberapa variabel utama, antara lain:

1. Upaya pengawasan terhadap obat dan makanan, seperti pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan menjelang hari-hari besar keagamaan (misalnya operasi Hari Raya) dan pengecekan produk kedaluwarsa. Kegiatan ini memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peredaran produk yang diawasi.
2. Upaya melindungi masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait pentingnya memilih dan menggunakan obat dan makanan yang aman.

Upaya ini mendorong terbentuknya konsumen yang cerdas, kritis, dan peduli terhadap keamanan produk yang dikonsumsi.

3. Jaminan keamanan produk yang beredar, melalui proses penerbitan izin edar bagi produk yang telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Proses ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang beredar telah melalui tahapan evaluasi dan penilaian sesuai pedoman yang ditetapkan.
4. Tindakan yang dilakukan BPOM dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsan, palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen BPOM dalam menegakkan regulasi dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan akibat produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Melalui serangkaian upaya tersebut, Balai POM di Kediri berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan.



Gambar 1.29 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT tahun 2020-2024

Balai POM di Kediri senantiasa berupaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pelaku usaha. Salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Unit Pelaksana Teknis (UPT). Melalui survei IKM, Balai POM di Kediri memperoleh gambaran nyata mengenai persepsi penerima layanan terhadap mutu pelayanan, profesionalisme pegawai, serta efektivitas proses pelayanan yang dilaksanakan. Pengukuran IKM dilakukan melalui aplikasi Sapa APIP

BPOM, yaitu sistem evaluasi daring yang dikelola oleh Badan POM untuk memantau tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di seluruh UPT.

9. Sasaran Kegiatan 9 (SK 9) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal

Selama periode Renstra 2020–2024, capaian SK 9 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal” menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Sasaran ini mencerminkan upaya Balai POM di Kediri dalam memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menata sistem pengelolaan administrasi pemerintahan agar semakin efektif dan efisien.

SK 9 beserta Indikator Kinerja pendukungnya baru diukur mulai tahun 2022 karena merupakan Indikator Kinerja yang baru diampu oleh Balai POM di Kediri pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, capaian SK 9 tercatat sebesar 91,49%, yang menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan telah berjalan dengan baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Nilai ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 91,80%, menggambarkan adanya perbaikan dalam sistem manajemen kinerja dan penguatan aspek pengawasan serta pelayanan publik.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan capaian mencapai 95,59%, menandakan tata kelola pemerintahan di Balai POM di Kediri semakin matang dan optimal. SK 9 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Indeks RB UPT, (2) Nilai AKIP UPT, dan (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan



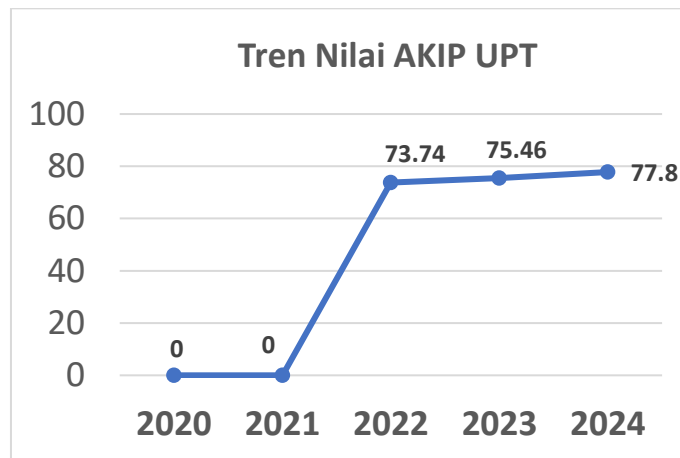
Gambar 1.30 Tren nilai indeks reformasi birokrasi Balai POM di Kediri tahun 2020-2024

Selama periode pelaksanaan Renstra 2020–2024, pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Balai POM di Kediri baru dilaksanakan pada tahun 2024, seiring dengan perubahan status kelembagaan dari Loka POM di Kediri menjadi Balai POM di Kediri yang diresmikan pada Oktober 2023. Perubahan status ini membawa konsekuensi pada perluasan mandat, peningkatan kapasitas organisasi, serta pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi yang sebelumnya belum menjadi target kinerja pada tingkat Loka. Pada tahun 2024, Balai POM di Kediri memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 63,5, yang mencerminkan kategori “Baik” berdasarkan kriteria penilaian reformasi birokrasi nasional. Capaian ini menjadi pijakan awal yang positif dalam penguatan tata kelola organisasi menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Meskipun merupakan pengukuran pertama, nilai tersebut mencerminkan hasil nyata dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama masa transisi kelembagaan, antara lain penguatan tata laksana dan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Balai POM di Kediri turut menjadi faktor pendorong utama dalam mewujudkan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pelayanan.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Kediri sebesar 63,5 pada tahun 2024 menjadi tonggak awal pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur di tingkat Balai, sekaligus menunjukkan komitmen kuat

organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



Gambar 1.31 Tren nilai AKIP UPT Balai POM di Kediri tahun 2020-2024

Selama periode pelaksanaan Renstra 2020–2024, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan tren capaian yang meningkat secara konsisten sejak mulai ditetapkan sebagai target kinerja pada tahun 2022.

Pada tahun 2020 dan 2021, indikator ini belum menjadi target kinerja satuan kerja, sehingga belum dilakukan pengukuran. Mulai tahun 2022, penilaian AKIP diimplementasikan dan Balai POM di Kediri memperoleh nilai sebesar 73,74, capaian ini menjadi langkah awal yang positif dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Pada tahun 2023, nilai AKIP meningkat menjadi 75,46, menunjukkan adanya perbaikan dalam penyusunan perencanaan kinerja, keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Upaya pembinaan berkelanjutan dari Inspektorat dan Biro Perencanaan serta peningkatan kapasitas SDM pengelola kinerja turut berkontribusi pada peningkatan tersebut.

Peningkatan capaian kembali terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 77,80, yang menunjukkan penguatan signifikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian ini mencerminkan peningkatan kedewasaan organisasi dalam menerapkan prinsip *performance-based budgeting*, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas data dukung dalam laporan kinerja.

Secara keseluruhan, tren capaian Nilai AKIP selama periode Renstra 2020–2024 menunjukkan arah positif dan progresif, dari nilai awal 73,74 pada 2022 menjadi 77,80 di tahun 2024. Kenaikan ini menandakan bahwa organisasi semakin mampu memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara terukur dan akuntabel.



Gambar 1.32 Tren nilai pengelolaan kearsipan Balai POM di Kediri tahun 2020-2024

Selama periode Renstra 2020–2024, capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan di Balai POM di Kediri menunjukkan tren relatif stabil dengan kecenderungan meningkat di akhir periode. Hal ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, nilai pengelolaan kearsipan mencapai 89,50, menunjukkan kinerja yang baik dalam penataan dan penyimpanan arsip, baik arsip aktif maupun inaktif. Capaian ini menjadi hasil dari upaya pembenahan tata naskah dinas, penyusunan klasifikasi arsip, serta penerapan sistem penataan dokumen sesuai pedoman kearsipan nasional.

Pada tahun 2023, nilai sedikit menurun menjadi 87,76. Penurunan ini bersifat sementara dan disebabkan oleh adanya proses penyesuaian sistem pengelolaan dan penilaian kearsipan di lingkungan instansi, termasuk penataan ulang arsip digital dan fisik akibat perubahan organisasi. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori baik, menandakan bahwa pengelolaan arsip tetap berjalan efektif dan terkendali.

Selanjutnya, pada tahun 2024, nilai pengelolaan kearsipan meningkat kembali menjadi 91,33, menandakan adanya peningkatan signifikan dalam tertib arsip,

konsistensi penerapan standar kearsipan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa hasil evaluasi dan tindak lanjut atas temuan tahun sebelumnya telah direspons secara tepat melalui pembenahan sistem dan peningkatan kapasitas petugas arsip.

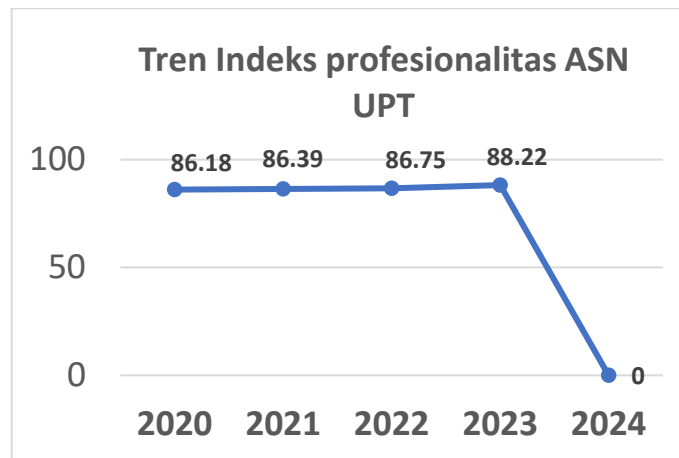
Secara keseluruhan, capaian selama periode Renstra menunjukkan tren positif dan berkelanjutan, dengan rata-rata nilai berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa Balai POM di Kediri telah berhasil mewujudkan pengelolaan arsip yang akuntabel, efisien, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

10. Sasaran Kegiatan 10 (SK 10) : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Sasaran kinerja Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal merupakan salah satu fokus strategis dalam Renstra 2020–2024, yang diarahkan untuk memastikan kapasitas, kompetensi, dan produktivitas SDM selalu berada pada tingkat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sepanjang periode 2020–2023, tren capaian sasaran kinerja menunjukkan konsistensi yang stabil dan berada pada kategori sangat baik, tercermin dari capaian tahun 2020 hingga 2023 yang berada di atas 100 persen. Pada tahun 2020, capaian sasaran tercatat sebesar 114,91, yang menunjukkan performa SDM di atas ekspektasi meskipun berada pada masa adaptasi pandemi. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022, capaian tetap tinggi masing-masing sebesar 100,22 dan 100,52, menandakan bahwa kualitas dan kinerja SDM tetap terjaga seiring dengan normalisasi proses kerja dan peningkatan kompetensi pegawai.

Memasuki tahun 2023, capaian kembali meningkat menjadi 102,11, yang mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek produktivitas, efektivitas pelaksanaan tugas, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih optimal. Adapun capaian tahun 2024 tidak dimasukkan dalam analisis tren karena perubahan tools dan metode perhitungan indikator yang tidak sebanding dengan periode sebelumnya. Dengan demikian, tren 2020–2023 menunjukkan bahwa UPT mampu mempertahankan kinerja SDM secara konsisten unggul, sekaligus menjadi fondasi bagi penguatan strategi pengembangan SDM pada periode perencanaan berikutnya.

SK 10 ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Indeks Profesionalitas ASN.



Gambar 1.33 Tren indeks profesionalitas ASN BPOM Kediri tahun 2020-2024

Selama periode Renstra 2020–2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN di Balai POM di Kediri menunjukkan tren stabil meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023. Indikator ini menggambarkan tingkat kompetensi, kinerja, disiplin, serta komitmen pegawai dalam menjalankan tugas sesuai prinsip Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pelayanan.

Pada tahun 2020, capaian indeks tercatat sebesar 86,18, menunjukkan bahwa sebagian besar ASN telah memenuhi standar kompetensi dan kinerja yang ditetapkan. Kinerja tersebut merupakan hasil dari pembinaan berkelanjutan, pelaksanaan penilaian kinerja individu secara objektif, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui kegiatan pengembangan kompetensi.

Pada tahun 2021, nilai indeks meningkat sedikit menjadi 86,39 dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 86,75, yang menandakan adanya peningkatan kualitas dan konsistensi dalam pelaksanaan manajemen ASN, baik dari sisi perencanaan kebutuhan pegawai, pola karier, hingga penegakan disiplin kerja. Kenaikan ini juga menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia berbasis merit system di lingkungan Balai POM di Kediri. Selanjutnya, pada tahun 2023, nilai indeks kembali meningkat menjadi 88,22, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengukuran. Peningkatan ini mencerminkan semakin matangnya profesionalitas ASN, ditandai dengan

penguatan budaya kinerja, integritas, dan tanggung jawab individu dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Sementara itu, pada tahun 2024, nilai Indeks Profesionalitas ASN tidak dihitung karena adanya perubahan tools perhitungan. Perubahan tersebut menyebabkan ketidakterbandingan hasil dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga capaian 2020–2023 dijadikan dasar evaluasi tren kinerja periode Renstra.

Secara keseluruhan, capaian selama empat tahun pengukuran menunjukkan tren peningkatan positif, hal ini menandakan bahwa Balai POM di Kediri telah berhasil membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

11. Sasaran Kegiatan 11 (SK 11) : Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara akuntabel

Selama periode Renstra 2020–2024, capaian sasaran kinerja “Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel” menunjukkan tren yang positif dan stabil meningkat, menggambarkan efektivitas pengelolaan keuangan, kedisiplinan pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

SK 11 beserta Indikator Kinerja pendukungnya baru diukur mulai tahun 2021 karena tahun 2020 Balai POM di Kediri masih berupa Loka POM dan belum menjadi satker mandiri. Pada tahun 2021, capaian SK 11 sebesar 95,59%, yang menunjukkan pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik, didukung oleh pelaksanaan anggaran yang efisien dan tertib administrasi. Nilai ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,30%, mencerminkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, peningkatan akurasi penatausahaan keuangan, serta penguatan pengawasan internal.

Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 98,26%, kinerja pengelolaan keuangan masih berada dalam kategori “Baik”. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap kebijakan pelaksanaan anggaran dan proses penilaian indikator pendukung, bukan karena penurunan kualitas pengelolaan.

Pada tahun 2024, capaian SK 11 meningkat signifikan menjadi 110,18%, menandakan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, efisien, dan

berkinerja tinggi. Peningkatan ini merupakan hasil nyata dari perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan.

SK 11 ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Nilai Kinerja Anggaran, (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan (4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.



Gambar 1.34 Tren nilai kinerja anggaran UPT Balai POM di Kediri tahun 2020-2024

Selama periode pelaksanaan Renstra 2020–2024, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat di awal periode dan terjaga pada tingkat tinggi hingga akhir periode. Pada tahun 2021, capaian sebesar 86,03, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang cukup efektif, baik dari aspek penyerapan, kualitas belanja, maupun ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tahun 2022, nilai kinerja anggaran meningkat menjadi 89,97, yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Peningkatan ini merupakan hasil dari langkah penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, serta perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi realisasi anggaran di seluruh unit kerja.

Selanjutnya, pada tahun 2023, capaian indikator meningkat tipis menjadi 90,20, mencerminkan konsistensi kinerja pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif. Peningkatan ini juga menandakan semakin baiknya koordinasi antara fungsi perencanaan dan pelaksanaan, serta efektivitas dalam pengelolaan revisi dan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan prioritas organisasi.

Pada tahun 2024, capaian sedikit menurun menjadi 89,79, namun masih berada dalam kategori sangat baik. Penurunan yang sangat kecil ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis seperti penyesuaian kebijakan belanja dan pergeseran anggaran akibat dinamika kebutuhan operasional, tanpa memengaruhi efektivitas dan kualitas keseluruhan pelaksanaan anggaran.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran selama periode Renstra 2020–2024 menunjukkan stabilitas kinerja yang tinggi dan berkelanjutan, menggambarkan keberhasilan organisasi dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip *value for money*.



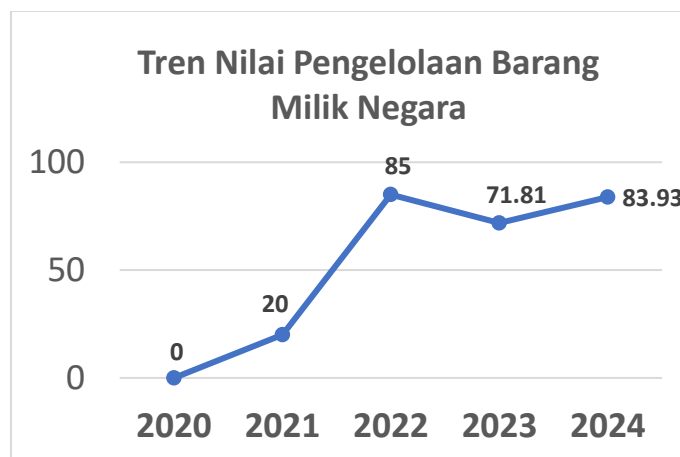
Gambar 1.35 Tren nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai POM di Kediri tahun 2020-2024

Selama periode Renstra 2020–2024, capaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Negara menunjukkan tren peningkatan dengan dinamika fluktuatif di pertengahan periode. Indikator ini baru diukur mulai tahun 2021 karena tahun 2020 Balai POM di Kediri masih berupa Loka POM dan belum menjadi satker mandiri. Pada tahun 2021, capaian awal sebesar 83,33, mencerminkan kualitas pengelolaan barang dan jasa yang cukup baik, ditandai dengan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, ketepatan perencanaan, serta penerapan prinsip efisiensi dan transparansi dalam proses pelaksanaan. Namun, pada tahun 2022 capaian mengalami penurunan signifikan menjadi 33,33. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap sistem penilaian baru serta adanya hambatan pada proses pelaksanaan pengadaan di sebagian unit kerja, seperti keterlambatan tahapan e-purchasing, perubahan kebutuhan kegiatan, dan keterbatasan kapasitas SDM pengelola pengadaan.

Kinerja pengelolaan barang dan jasa mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2023, dengan capaian meningkat menjadi 75,38. Peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas berbagai upaya pembenahan yang dilakukan, antara lain melalui pendampingan teknis pengadaan, peningkatan kompetensi pejabat pengadaan, penguatan sistem perencanaan kebutuhan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Upaya perbaikan tersebut berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian meningkat signifikan menjadi 90,00. Nilai ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara lebih profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan prinsip *value for money*.

Secara keseluruhan, tren capaian selama periode Renstra menunjukkan arah positif dan berkelanjutan, yang menggambarkan keberhasilan organisasi dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa secara transparan, efektif, dan akuntabel.



Gambar 1.36 Tren nilai pengelolaan barang milik negara UPT BPOM Kediri Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) selama periode Renstra 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dengan dinamika capaian di beberapa tahun pelaksanaan. Indikator ini baru diukur mulai tahun 2021 karena tahun 2020 Balai POM di Kediri masih berupa Loka POM dan belum menjadi satker mandiri. Pada tahun 2021, nilai capaian tercatat sebesar 20, yang mencerminkan kondisi awal pengelolaan BMN yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi penataan administrasi, validasi data, maupun optimalisasi pemanfaatan aset.

Pada tahun 2022, capaian meningkat signifikan menjadi 85. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang dilakukan, antara lain melalui penertiban dan inventarisasi aset, peningkatan kepatuhan pelaporan, serta penerapan sistem informasi pengelolaan BMN yang lebih terintegrasi. Namun demikian, pada tahun 2023 capaian mengalami sedikit penurunan menjadi 71,81. Penurunan ini disebabkan oleh proses validasi ulang dan koreksi data hasil revidi internal serta penerapan mekanisme penilaian yang lebih ketat, yang justru mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan melalui penegakan prinsip ketertiban administrasi dan akurasi data aset.

Memasuki tahun 2024, capaian kembali meningkat menjadi 83,93. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, dan akuntabel melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pengelola BMN, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada periode Renstra 2020–2024 menunjukkan tren positif dan menggambarkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola aset negara. Peningkatan capaian tersebut menjadi wujud nyata komitmen organisasi dalam mengoptimalkan kualitas pengelolaan BMN guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel.



Gambar 1.37 Tren persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2020-2024

Selama periode pelaksanaan Renstra 2020–2024, capaian indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal pengukuran

tahun 2020 dan 2021, capaian masih berada pada angka 0%, yang mencerminkan bahwa kebijakan penggunaan produk dalam negeri belum menjadi fokus utama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Memasuki tahun 2022, capaian mulai meningkat menjadi 19,57% seiring dengan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah untuk memperkuat Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan instruksi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh mulai diterapkannya kewajiban pemanfaatan produk dalam negeri melalui e-katalog serta sosialisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada satuan kerja.

Pada tahun 2023, capaian kembali meningkat menjadi 41,28%. Hal ini menunjukkan efektivitas dari langkah-langkah strategis seperti penetapan target minimal belanja PDN di setiap satuan kerja, peningkatan ketersediaan produk dalam negeri di katalog elektronik, serta pendampingan teknis pelaksanaan pengadaan berbasis PDN. Upaya konsolidasi dan koordinasi antarunit kerja juga semakin memperkuat pelaksanaan kebijakan ini.

Selanjutnya, pada tahun 2024, capaian indikator mencapai 73,79%, yang menandakan keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan prioritas penggunaan produk dalam negeri secara optimal. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan industri nasional serta perwujudan kemandirian ekonomi melalui penguatan ekosistem belanja pemerintah yang berpihak pada produk lokal.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri selama periode Renstra 2020–2024 menunjukkan arah peningkatan yang konsisten dan progresif. Peningkatan capaian ini menggambarkan keberhasilan organisasi dalam menindaklanjuti arahan pemerintah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kediri dan sekitarnya, Balai POM di Kediri memahami pentingnya memperkuat sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Perubahan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi menuntut Balai POM di Kediri untuk

melaksanakan pengawasan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Kediri dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai POM di Kediri dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra Balai POM di Kediri 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPOM dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. BPOM menjangkarkan feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) periode 2024 dengan melibatkan 234 responden dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat. diperoleh beberapa aspirasi utama masyarakat terhadap Balai POM di Kediri, antara lain:

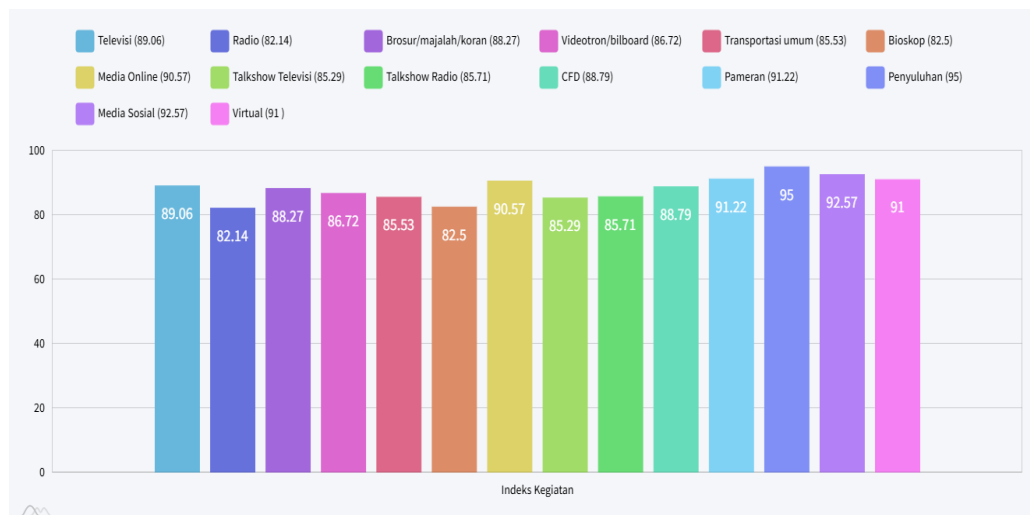
1. Pelaksanaan Pengawasan yang Lebih Menyeluruh dan Merata.

Masyarakat mengharapkan Balai POM di Kediri memperluas jangkauan pengawasan hingga ke wilayah pedesaan dan sentra UMKM pangan, guna

memastikan seluruh produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai ketentuan

2. Peningkatan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung maupun Tidak Langsung

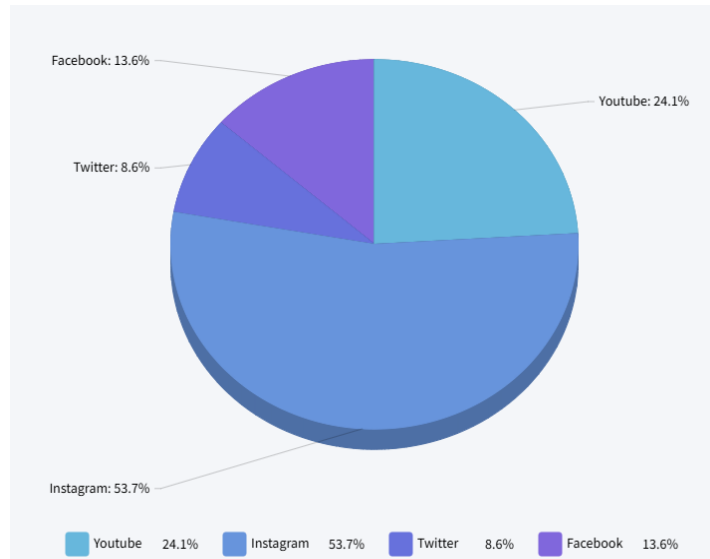
Hasil survei menunjukkan kegiatan penyuluhan (indeks 95) dan pameran (91,22) menjadi bentuk KIE paling efektif, diikuti oleh media sosial (92,57) dan media online (90,57). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat antusias terhadap edukasi tatap muka, namun juga aktif mengakses informasi melalui kanal digital.



Gambar 1.38 Indeks Efektifitas Kegiatan KIE

3. Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dan Platform Digital.

Dengan lebih dari 53% responden mengetahui BPOM dari Instagram, masyarakat mendorong agar Balai POM Kediri memperkuat konten edukatif digital, seperti video pendek, infografis, dan kampanye daring yang menarik bagi generasi muda.



Gambar 1.39 Media Sosial yang diakses oleh Masyarakat

Selain ketiga poin tersebut, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BPOM diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), sosial dan ekonomi serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dengan imbang gender.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Balai POM di Kediri berdiri sejak tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Kediri yang awalnya Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki tantangan tersendiri dalam mengawal tugas pengawasan obat dan makanan dalam keterbatasan SDM maupun sarana prasarana.

Balai POM di Kediri selaku UPT Badan POM RI diharapkan mampu mengawal program pembangunan pemerintah melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Kediri diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan masyarakat di eks-Karisidenan Kediri Raya yang lebih sehat dan sejahtera. Sebagai konsekuensi yang logis akibat peningkatan status inilah, Balai POM di Kediri dalam melakukan tugas pengawasan obat dan makanan dengan berbagai potensi dan permasalahan yang ada, mulai menyusun Rencana Strategis untuk kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Kediri tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah di wilayah kerja Balai POM di Kediri, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah di wilayah kerja Balai POM di Kediri.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Kediri menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Kediri periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Kediri, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat di wilayah Kediri Raya.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Kediri, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Kediri keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM Kediri di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Kediri, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

1. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Balai POM di Kediri

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik, Balai POM di Kediri harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan Balai POM di Kediri untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjangkau masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta

pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan. Balai POM di Kediri sangat memperhatikan masukan dari masyarakat melalui survey SKM sebagai upaya memperbaiki dan lebih meningkatkan pelayanan. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai POM di Kediri mendapatkan nilai sangat baik selama tahun 2021 dan 2024 dan selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 87.09, pada tahun 2022 sebesar 88.33, pada tahun 2023 sebesar 88.79, dan pada tahun 2024 sebesar 90,86. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Balai POM di Kediri pada tahun 2024 sebesar 80.74 dengan target 69.11, nilai tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja dan layanan maka Balai POM di Kediri terus bergerak melakukan perbaikan yang menjadi *booster* untuk kerja lebih keras, cerdas dan ikhlas.

2. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional

Perubahan status kelembagaan dari Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi Balai POM di Kediri sejak tahun 2023 berbanding lurus dengan beban pekerjaan, tantangan yang harus dihadapi juga semakin beragam dan kompleks. Didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas tinggi, Balai POM di Kediri mampu melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya dengan baik.

Kualitas SDM juga ditunjang dengan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis dari pusat maupun program pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Kediri. Selain itu, budaya kerja yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan yang strategis menjadikan SDM di Balai POM di Kediri siap menghadapi transformasi digital dan tuntutan reformasi birokrasi.

Berdasarkan latar belakang Pendidikan pegawai Balai POM di Kediri sebagai berikut:

Tabel 1.7 Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai
D3	5
Sarjana	17
Profesi	11
Pasca Sarjana	3
Total	36

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan yang sesuai menjadi kekuatan utama pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara profesional dan berbasis keilmuan.

3. Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Percepatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Kediri selaku UPT Badan POM RI telah menjalin kerjasama dengan lintas sektor di Kabupaten/Kota di wilayah eks-Karisidenan Kediri Raya, yaitu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Khusus dengan Dinas Kesehatan, Balai POM di Kediri juga memberikan advokasi, bimbingan teknis dan monitoring terkait bantuan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan yang bermanfaat dalam menjangkau pengawasan pre dan post market sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian di daerah.

Dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Balai POM di Kediri menjalin kerjasama dengan pendirian layanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/Kota, saat ini layanan publik Balai POM di Kediri hadir di MPP Kota Blitar, MPP Kabupaten Tulungagung dan MPP Kabupaten Kediri. Dengan hadirnya Balai POM di Kediri pada MPP semakin mendekatkan layanan publik dengan masyarakat di wilayah eks-Karisidenan Kediri Raya. Selain itu, Balai POM di Kediri juga melakukan pengawasan bersama sarana pelayanan kefarmasian dengan DPMPTSP Kota Kediri.

Terkait penegakan hukum Balai POM di Kediri bekerjasama dengan aparat penegak hukum, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea Cukai, BNN di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Selain dengan aparat penegak hukum, Balai POM di Kediri juga bekerjasama dengan Asosiasi Jasa Pengiriman (Asperindo) di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Kerjasama dalam rangka penegakan hukum antara lain : saksi pemusnahan, saksi ahli, konsultasi hukum dan pengawasan di area jasa pengiriman.

Jejaring kemitraan dan kolaborasi lintas sektor yang kuat dengan berbagai instansi menjadi modal strategis dalam memperluas jangkauan pengawasan. Dengan meningkatnya kapasitas koordinatif dan jejaring kerja yang kuat, Balai POM di Kediri dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi dan berkelanjutan demi melindungi kesehatan masyarakat.

4. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

- a. Balai POM di Kediri memiliki ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berkesinambungan dan terarah. Kekuatan ini tampak dari terbentuknya jaringan kemitraan lintas sektor yang solid, melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa dalam mendukung penyebaran pesan keamanan obat dan makanan. Kapasitas sumber daya manusia yang kompeten serta berpengalaman dalam melaksanakan KIE, baik melalui pendekatan tatap muka, media digital, maupun pemberdayaan komunitas, turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, Balai POM di Kediri telah mengembangkan materi edukasi yang adaptif dan kontekstual sesuai karakteristik sasaran, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok rentan seperti anak sekolah maupun ibu rumah tangga. Antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan edukasi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keamanan pangan, obat, obat bahan alam dan kosmetik. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara efektif memperluas jangkauan pesan KIE dan memperkuat citra positif BPOM di mata publik. Kekuatan ini menjadi modal strategis dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri menjamin keamanan obat dan makanan serta membangun ekosistem pengawasan berbasis komunitas yang berkelanjutan. BPOM Kediri telah rutin melaksanakan kegiatan KIE ke Masyarakat pada seluruh wilayah kerjanya.

Tabel 1.8 Kegiatan KIE

Tahun	Jumlah Peserta	Tingkat Efektivitas KIE
2024	234	93,74%
2023	265	93,27%
2022	265	93,27%
2021	343	92,47%

Selain melaksanakan KIE secara langsung, Balai POM di Kediri juga melaksanakan KIE melalui media sosial, media cetak dan elektronik guna menjangkau Masyarakat secara lebih luas dalam memperoleh informasi seputar obat dan makanan.

b. SAKA POM

Balai POM di Kediri memiliki ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat melalui pengembangan dan pembentukan Satuan Karya (SAKA) Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Pembentukan SAKA POM ini menjadi wujud nyata komitmen BPOM dalam menanamkan nilai-nilai keamanan obat dan makanan sejak dini kepada generasi muda, khususnya kalangan pelajar. Keberadaan SAKA POM telah menciptakan wadah edukatif yang mendorong partisipasi aktif pramuka dalam kegiatan pengawasan berbasis komunitas serta memperluas jangkauan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan rutin, pelatihan, dan praktik lapangan yang melibatkan berbagai pihak, Balai POM di Kediri berhasil membangun jejaring kader muda yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian tinggi terhadap pentingnya keamanan pangan, obat, dan kosmetik. Sinergi antara BPOM, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dinas pendidikan, serta pihak sekolah memperkuat keberlanjutan program ini sebagai bagian dari ekosistem edukasi yang inklusif dan berdaya guna. Kekuatan ini menjadi modal strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan berperan aktif dalam menjamin keamanan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri. BPOM Kediri telah menerbitkan surat Keputusan Kepala Balai untuk pengukuhan pengurus SAKA POM di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri pada tahun 2023.

c. Bimbingan Teknis Pelaku Usaha

Balai POM di Kediri memiliki ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat, yang tercermin melalui

pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin edar BPOM. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen BPOM dalam mendorong peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha terhadap regulasi keamanan, mutu, dan keamanan produk pangan, obat, kosmetik, serta obat bahan alam. Melalui kegiatan pendampingan yang intensif, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai persyaratan teknis, tata cara pendaftaran produk, serta penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perizinan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Sinergi yang terjalin antara BPOM, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan bimbingan teknis turut memperkuat ekosistem pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan. Kekuatan ini menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan pelaku usaha yang berdaya saing, patuh regulasi, dan berperan aktif dalam menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.

5. Memiliki strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik

Balai POM di Kediri memiliki strategi dan saluran komunikasi publik, baik eksternal maupun internal, yang dikelola secara terarah dan efektif. Pengelolaan komunikasi ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik, peningkatan literasi masyarakat, serta memperkuat citra kelembagaan sebagai instansi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Pelaksanaan strategi komunikasi publik didukung oleh media sosial resmi dan berbagai media informasi yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan edukatif, himbauan, serta capaian kegiatan pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat. Konten yang disampaikan bersifat informatif, aktual, dan interaktif sehingga mampu meningkatkan jangkauan serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program Balai POM di Kediri.

Balai POM di Kediri juga memiliki subsite resmi di laman kediri.pom.go.id yang berfungsi sebagai pusat informasi daring. Melalui subsite tersebut, berbagai

berita aktual, dokumentasi kegiatan, publikasi edukatif, serta informasi layanan publik selalu diperbarui secara berkala. Keberadaan subsite ini memperkuat kehadiran Balai POM di Kediri dalam ruang digital sekaligus menjadi kanal resmi yang terpercaya bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkini seputar pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kediri dan sekitarnya.

Didukung dengan pengelolaan media yang baik, Balai POM di Kediri juga memiliki beragam inovasi layanan publik yang memperkuat efektivitas komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga wadah partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa inovasi unggulan tersebut antara lain:

- WARA POM (WA Resmi Aman untuk Rakyat Kediri dari BPOM) — inovasi layanan berbasis pesan instan untuk mempercepat komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat, ditetapkan melalui SK Kepala Balai POM di Kediri Nomor HK.02.02.17B.07.24.41 Tahun 2024.
- SIAP PASTI (Sistem Informasi dan Pelayanan Obat dan Makanan Terintegrasi di Mall Pelayanan Publik) — sistem layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi dan layanan secara cepat di Mall Pelayanan Publik, ditetapkan melalui SK Kepala Balai POM di Kediri Nomor HK.02.02.17B.07.24.41 Tahun 2024.
- POTRET TIWAS (Pojok Tanpa Izin Edar Wajib Anda Sadari) — media edukasi publik yang menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengenali dan melaporkan produk tanpa izin edar, ditetapkan melalui SK Kepala Balai POM di Kediri Nomor HK.02.02.17B.07.24.41 Tahun 2024.
- LINTAZ (Layanan Interaktif melalui Zoom) — inovasi pelayanan interaktif berbasis daring yang memberikan kemudahan konsultasi dan komunikasi dua arah antara masyarakat dan petugas BPOM, ditetapkan melalui SK Kepala Balai POM di Kediri Nomor HK.02.02.19B.02.25.49 Tahun 2025.

Dengan adanya berbagai inovasi dan pengelolaan komunikasi yang terencana, Balai POM di Kediri memiliki daya saing kelembagaan yang kuat dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengawasan Obat dan Makanan. Strategi komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dukungan kebijakan formal melalui Surat Keputusan Kepala Balai menjadi

fondasi penting bagi peningkatan efektivitas penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan.

Kekuatan ini menjadikan Balai POM di Kediri sebagai UPT yang progresif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan.

6. Komitmen Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM

Balai POM di Kediri memiliki komitmen yang kuat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi digital sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Badan POM. Kekuatan ini tercermin dari konsistensi satuan kerja dalam menerapkan berbagai aplikasi dan sistem digital yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, seperti sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik, aplikasi manajemen kinerja, sistem pelaporan keuangan, hingga layanan publik berbasis digital.

Aplikasi dan sistem digital yang digunakan oleh Balai POM di Kediri dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- Mendukung pengawasan : Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), Monitoring pengawalan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (SMARTPOM), Aplikasi Sistem Informasi Metode Analisis (SIMA), Aplikasi Cekbpom, e-was.pom.go.id
- Pelayanan Publik: e-sertifikasi.pom.go.id dan sertifikasicdob.pom.go.id
- Aplikasi Manajemen Kinerja: Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
- Sistem Pelaporan Keuangan dan Kinerja: SAKTI, OM SPAN, Simetris
- Sistem Administrasi Persuratan: Aplikasi Srikandi

Selain itu, Balai POM di Kediri juga memiliki SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan SPBE, literasi digital, serta pengembangan inovasi pelayanan. Dukungan infrastruktur TIK yang memadai dan integrasi sistem internal dengan platform nasional BPOM memperkuat efisiensi, akurasi data, serta kecepatan pengambilan keputusan.

Keterbukaan terhadap inovasi layanan dan digitalisasi proses kerja juga menjadi modal utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan fondasi ini, Balai POM di Kediri siap berperan aktif dalam mendukung transformasi digital BPOM menuju pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik berbasis data.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, Balai POM di Kediri tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Kediri dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Kediri, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Kapasitas SDM belum memadai

Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Kediri sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah Pegawai di Balai POM Kediri sampai dengan Oktober tahun 2025 sebanyak 36 ASN dengan rincian 32 PNS dan 4 PPPK.

Tabel 1.9 Data ABK

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Kediri	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Kediri	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	0	2	0%
5	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
6	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	0	1	0%

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
7	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	1	2	33%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	5	1	4	20%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	15	11	4	73%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	16	13	3	81%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Fungsional	0	1	-1	100%
12	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
13	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
17	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
18	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
19	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
20	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
21	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	2	-2	100%
TOTAL			55	36	19	65.45%

Berdasarkan data ABK Balai POM di Kediri diatas, saat ini jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan baru terpenuhi sebesar 65,45%. Keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan beban kerja masing-masing pegawai tinggi dan kegiatan dijalankan secara multitasking. Hal ini berpotensi mempengaruhi efisiensi kinerja organisasi.

2. Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM

Mayoritas laboratorium Badan POM yang tersebar di seluruh Indonesia telah terakreditasi dan dilengkapi dengan standar peralatan yang menunjang dan sumber daya manusia yang kompeten. Namun belum semua laboratorium di Badan POM memenuhi kapabilitas tersebut, salah satunya Laboratorium Balai POM di Kediri sebagai Laboratorium Tier 2. Adanya kesenjangan kapabilitas laboratorium dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrument laboratorium, ruang lingkup

pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Sampai dengan awal tahun 2025, kapabilitas laboratorium Balai POM di Kediri dalam pemenuhan standar ruang lingkup adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10 Kapabilitas Laboratorium Balai POM di Kediri Dalam Pemenuhan Standar Ruang Lingkup

No	Komoditi	Ruang Lingkup yang mampu dilakukan	Gap Ruang Lingkup Lab Tier 2
1.	Obat	Identifikasi dengan Rapid Test	Pengujian sesuai monografi dengan instrumen
2.	Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	Belum dapat dilakukan	Identifikasi BKO dan zat aktif
3.	Kosmetik	Belum dapat dilakukan	Identifikasi bahan yang dilarang dalam kosmetik
4.	Pangan Olahan	Identifikasi bahan yang dilarang dalam pangan secara Rapid Test Kit	Identifikasi bahan dilarang dan penetapan kadar secara instrumentasi / Gravimetri/ Volumetri

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana di Balai POM di Kediri, peralatan yang dimiliki laboratorium Balai POM di Kediri masih belum memenuhi keseluruhan standar peralatan untuk laboratorium Tier 2, antara lain :

Tabel 1.11 Tabel Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium Balai POM di Kediri yang Belum Memenuhi Standar Laboratorium Tier 2

No	Standar Peralatan Kimia		Standar Peralatan Mikrobiologi	
	Instrumen yang dimiliki	Gap Instrumen	Instrumen yang dimiliki	Gap Instrumen
1	Timbangan (Mikro, Analitik, Top loading)	AAS	Autoclave	AW meter
2	Spektrofotometer UV Vis	Oven	Inkubator (4 unit)	Kurang 3 Unit
3	Spektrofotodensitometer	HPLC dan GC	BSC	Kurang 1 Unit
4	pH meter	Dissolution tester	Colony counter	Conductivity meter

No	Standar Peralatan Kimia		Standar Peralatan Mikrobiologi	
	Instrumen yang dimiliki	Gap Instrumen	Instrumen yang dimiliki	Gap Instrumen
5	Alat penunjang lainnya	Disintegration tester, Karl Fishcher dll	Alat penunjang yang lain	Vacuum Manifold

Sedangkan dalam melaksanakan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, laboratorium Balai POM di Kediri hanya didukung oleh 2 (dua) personil penguji Kimia dan 2 (dua) personil penguji Mikrobiologi dengan tingkat kompetensi yang variatif. Kesenjangan ruang lingkup dan peralatan serta ketidakmerataan kompetensi ini menimbulkan kelemahan dalam menjaga efektivitas, konsistensi dan keandalan hasil pengujian, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap integritas pengawasan BPOM secara keseluruhan.

Dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian, Balai POM di Kediri berupaya maksimal dalam pemenuhan ruang lingkup dengan melengkapi reagen dan peralatann yang dibutuhkan, serta peningkatan kompetensi bagi personil pengujian, menyampaikan kendala yang dihadapi kepada PPPOMN pada Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratirum (SKL).

3. Sarana Prasarana terkait infrastruktur TIK belum memadai

Salah satu kelemahan yang dimiliki Balai POM di Kediri saat ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan infrastruktur TIK. Ketersediaan perangkat keras, jaringan internet, dan perangkat lunak masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi kebutuhan operasional dan pengawasan berbasis elektronik. Setiap tahunnya Balai POM di Kediri terdapat penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan beban kerja namun belum diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana TIK. Kebutuhan sarana dan prasarana TIK yang masih belum memadai, diantaranya yaitu :

- Alat Pengolah data (APD), seperti Laptop dan *Personal Computer* (PC)
- Printer, *paper destroyer* dan *Scanner*
- Perangkat pendukung kegiatan daring

- Jaringan Internet
- Perangkat kameran pengawas / CCTV

Keterbatasan perangkat ini disebabkan karena dampak dari efisiensi anggaran sehingga Balai POM di Kediri tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan perangkat TIK tersebut. Hal ini mengakibatkan layanan operasional menjadi terganggu dan tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi

Tahun 2025, terdapat program prioritas dari pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan Balai POM di Kediri dalam pengawasannya sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dan peningkatan keamanan pangan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala sulitnya koordinasi antara Balai POM di Kediri dengan koordinator wilayah dan/atau Kepala SPPG di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi terkait jumlah, wilayah dan cakupan serta penerima manfaat MBG, dan kesulitan dalam mencari lokasi sarana SPPG.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Kediri untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa wilayah Kediri Raya tetap sejalan dengan standar nasional dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Kediri untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan :

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dengan perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan menuntut kebutuhan akan obat dan makanan yang makin beragam sehingga produsen/industri di

bidang obat dan makanan berlomba-lomba berinovasi untuk menghasilkan produk obat dan makanan yang terkini mengikuti perkembangan jaman. Dengan semakin beragamnya produk obat dan makanan yang beredar maka para produsen berlomba-lomba untuk mendaftarkan produk obat dan makanan di Badan POM RI. Untuk dapat menampung antusiasme pendaftar tersebut, Badan POM RI mengakomodir dengan pendaftaran yang terkoneksi dengan OSS RBA (On-line Single Submission Risk Based Approach). Pendaftaran produk obat dan makanan semakin mudah dan mendorong pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan produk yang dihasilkan menjadi produk obat dan makanan yang berdaya saing, baik regional maupun global.

Selama tahun 2024, Balai POM di Kediri telah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengurusan Sertifikat IP CPPOB sebanyak 83 (delapan puluh tiga) sertifikat, Sertifikat CDOB sebanyak 11 (sebelas) sertifikat, Sertifikat CPOTB bertahap sebanyak 5 (lima) sertifikat, Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB bertahap sebanyak 3 (tiga) sertifikat serta Rekomendasi Pemohon Notifikasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi.

Pasar produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kediri menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat merefleksikan peluang bagi Balai POM di Kediri untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Balai POM Kediri memiliki posisi strategis sebagai regulator yang menjamin bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan. Balai POM di Kediri memiliki peran sebagai regulator yang melindungi konsumen pengguna produk dan sebagai regulator yang dapat mendorong kemandirian pelaku usaha.

Dalam menjalankan komitmen untuk mendorong kemandirian pelaku usaha, Balai POM di Kediri melakukan beberapa program pendampingan para pelaku usaha melalui beberapa kegiatan tahunan antara lain :

- a. Program pendampingan pelaku usaha mikro kecil sediaan farmasi dan pangan olahan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain :
 - Sosialisasi terkait program pendampingan pelaku usaha UMK sediaan farmasi dan pangan olahan
 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis pelaku usaha UMK sediaan farmasi dan pangan olahan

- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam bentuk pendampingan pendaftaran perizinan, pemeriksaan sarana dan pendampingan penyusunan dokumen kelengkapan perizinan bagi pelaku usaha UMK sediaan farmasi dan pangan olahan
 - Percepatan sertifikasi dan pendaftaran izin edar bagi pelaku usaha UMK sediaan farmasi dan pangan olahan
- b. Program jemput bola registrasi pangan olahan yang merupakan kolaborasi antara Balai POM di Kediri dengan Badan POM yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan

2. Kolaborasi strategis dengan stakeholder baru

Program pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan ke anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui berdampak pada dibentuknya Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menangani langsung program MBG ini, yakni Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi dengan BGN sudah dimulai dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Badan POM RI dengan Kepala BGN.

Di awal program, Balai POM di Kediri berkontribusi dalam melatih dan mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nantinya akan bertugas memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelatihan yang diberikan meliputi, Informasi Nilai Gizi (ING), Hazard and Analytical Critical Control Point (HACCP), Ketertelusuran (Traceability), Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan.

Selain itu Balai POM di Kediri juga membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dapur SPPG untuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan investigasi awal jika terjadi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan akibat program MBG.

3. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tingginya antusiasme dan peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan peluang strategis bagi Balai POM di Kediri dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis komunitas. Peningkatan partisipasi masyarakat terlihat dari semakin aktifnya pelaporan

dugaan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi seperti HaloBPOM, media sosial, WA resmi layanan BPOM di Kediri, dan pengaduan secara langsung di ULPK BPOM di Kediri. Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM di Kediri, pada tahun 2024 terdapat 6 pengaduan, terjadi peningkatan dari tahun 2023 yang hanya berjumlah 3.

Antusiasme juga terlihat dalam keberhasilan pembentukan kader keamanan pangan melalui program Desa Pangan Aman, Pasar Aman, dan Sekolah dengan PJAS Aman menunjukkan adanya antusiasme peran serta masyarakat sebagai agen perubahan di lingkungannya yang kuat untuk mendukung pengawasan partisipatif. Kader dan tokoh masyarakat berperan penting sebagai pelopor edukasi di tingkat lokal, membantu menyebarkan pesan keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang aman dan bermutu. Pada program desa/kelurahan pangan aman di Kelurahan Klampok, berhasil memberdayakan masyarakat dari berbagai komunitas dan berhasil meraih prestasi tingkat nasional sebagai juara 3 Desa Pangan Aman Regional Barat. Selain itu, pada program Desa Pangan Aman, Pasar Aman, dan Sekolah dengan PJAS Aman mendapatkan umpan balik positif dari berbagai stakeholder yang manfaatnya dirasakan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan.

Berdasarkan data laporan kinerja, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan pada tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 80,74 dari target 69,11. Capaian BPOM di Kediri melampaui target yang ditentukan. Hal ini menggambarkan kepercayaan dan apresiasi masyarakat baik terhadap kinerja Balai POM di Kediri dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan berdampak nyata bagi perlindungan masyarakat.

Dukungan dan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat juga membuka peluang bagi Balai POM di Kediri untuk memperluas cakupan kegiatan edukasi dan advokasi di bidang obat dan makanan melalui kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, PKK, sekolah, pondok pesantren, dan pelaku usaha mikro.

4. Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan

Setelah berakhirnya pandemi Covid-19, konsumsi masyarakat terhadap pangan makin meningkat dan dengan adanya program prioritas pemerintah yaitu MBG membuat pangan yang beredar semakin banyak dan beragam. Pemerintah Daerah juga semakin gencar mempromosikan daerahnya untuk pariwisata, pendidikan maupun untuk investasi. Dengan promosi inilah, pangan asli daerah juga ikut dipromosikan sehingga banyak UMKM yang antusias untuk mendaftarkan produk hasil produksinya ke Badan POM RI. Semakin banyak dan beragamnya produk pangan yang beredar merupakan kesempatan bagi Balai POM di Kediri untuk lebih meningkatkan pengawasan produk pangan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pelaku usaha, KIE tentang Keamanan Pangan di komunitas, pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan serta melakukan sampling dan pengujian produk pangan.

5. BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Masyarakat saat ini berharap banyak dengan kehadiran Balai POM di Kediri untuk dapat memberikan informasi yang terkini dan aktual terkait obat dan makanan karena Balai POM di Kediri merupakan *leading sector* dalam pengawasan obat dan makanan.

Pemberian informasi oleh Balai POM di Kediri meliputi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada komunitas, Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang diedarkan melalui media massa dan media sosial. Adapun kegiatan yang sering dilakukan yaitu :

- Penyuluhan langsung kepada masyarakat
- Edukasi terkait cek KLIK
- Pendampingan terhadap UMKM di wilayah kerja Balai POM di Kediri
- Keterlibatan Balai POM di Kediri dalam pengawalan MBG
- Berpartisipasi dalam sosialisasi *stunting*
- Sosialisasi dan edukasi terkait produk Obat dan Makanan ilegal dan berbahaya

Reputasi Balai POM di Kediri sebagai *leading sector* pengawas Obat dan Makanan yang dipercaya oleh masyarakat menjadi peluang strategis dalam edukasi publik dan diseminasi keamanan Obat dan Makanan.

6. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor

Sejak tahun 2018, menindak lanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM RI melalui Kementerian Keuangan mengucurkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diemban fungsinya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Balai POM di Kediri selaku UPT Badan POM RI di daerah ikut mengawal dan memonitoring pelaksanaan serta evaluasi pemanfaatan DAK NF BOK POM tersebut. Pengawasan tersebut meliputi Rapat Perencanaan Kegiatan yang akan menggunakan DAK NF BOK POM, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui desk aplikasi SMARTPOM maupun melalui laporan bulanan yang dilaporkan Dinas Kesehatan tiap triwulan.

Di tahun 2024, hanya 4 (empat) Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kediri mendapatkan DAK NF BOK POM ini yaitu Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung dan dengan realisasi fisik sebesar 70,76% dan realisasi anggaran sebesar 57,55%.

Selanjutnya pemberian DAK NF BOK POM akan lebih ditingkatkan lagi cakupannya, yaitu menambah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan anggaran DAK serta menambahkan menu-menu kegiatan pengawasan obat dan makanan yang lebih beragam.

7. Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diarusutamakan

Pengarusutamaan gender dan Inklusi sosial (PUGIS) merupakan salah satu prinsip utama dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Balai POM di Kediri memandang inklusi sosial sebagai peluang strategis untuk memperkuat

efektivitas pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan jangkauan layanan publik yang adil dan setara. Melalui pendekatan inklusif, Balai POM di Kediri dapat memperluas target sasaran kegiatan KIE, mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk kelompok rentan.

1.2.4 Ancaman (*Threats*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Kediri. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Kediri dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Kediri dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya perdagangan obat dan makanan melalui platform online. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga membuka peluang terjadinya peredaran produk ilegal seperti obat tanpa izin edar, suplemen mengandung bahan berbahaya, dan makanan olahan tidak memenuhi standar keamanan.

Bagi Balai POM di Kediri, fenomena ini menjadi tantangan karena peredaran produk melalui internet bersifat masif, cepat, dan seringkali sulit dilacak. Pelaku kejahatan siber biasanya menggunakan akun anonim, situs sementara, atau marketplace besar untuk menghindari pengawasan.

Sebagai respon, Balai POM di Kediri telah memiliki petugas yang melakukan pemantauan digital (*cyber patrol*) terhadap aktivitas perdagangan daring. Hasil dari kegiatan ini berupa pembekuan alamat website dan akun penjual di e-commerce yang terbukti menjual produk ilegal.

Berdasarkan hasil pemantauan siber tahun 2024–2025, banyak ditemukan peredaran produk ilegal seperti kosmetik tanpa izin edar, obat tradisional, dan obat keras yang dijual melalui berbagai platform digital.

Dari total 19 kasus yang teridentifikasi, sebanyak 13 kasus (68%) ditemukan di platform Shopee, sedangkan sisanya tersebar di Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Jenis pelanggaran paling dominan adalah kosmetik ilegal sebanyak

14 kasus (74%), diikuti oleh obat tradisional ilegal 4 kasus, dan obat keras 1 kasus. Dari keseluruhan kasus, hanya 2 kasus yang berhasil ditakedown, 4 kasus ditindaklanjuti, dan 11 kasus telah diverifikasi di lapangan.

Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, menjaga kepercayaan publik terhadap produk pangan dan obat yang legal, serta memperkuat citra BPOM sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun, pengawasan ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kewenangan, volume data digital yang besar, serta kemampuan pelaku untuk berpindah platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi dengan instansi terkait antara lain : Kominfo, Polri, dan e-commerce, peningkatan kapasitas SDM siber, serta pemanfaatan teknologi deteksi otomatis untuk memantau peredaran produk ilegal secara lebih efektif.

2. Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan

OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memberikan izin berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha. Sistem ini menggantikan sistem OSS sebelumnya dengan membedakan persyaratan perizinan berdasarkan tingkat bahaya dan potensi risiko dari suatu usaha. Dengan pendaftaran yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, maka pendaftaran produk obat dan makanan semakin cepat dan mudah sehingga berdampak pada munculnya produk-produk baru dan perubahan pola konsumsi pada masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem pengawasan Obat dan Makanan. Perubahan ini menuntut kemampuan adaptasi regulasi, teknologi dan sumber daya pengawasan yang lebih responsif terhadap perubahan tren. Jika tidak diantisipasi hal ini dapat mempengaruhi efektifitas perlindungan konsumen serta kepercayaan publik terhadap Balai POM di Kediri.

3. Maraknya penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pada era digital yang serba cepat, informasi dapat tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi yang beredar memiliki dasar

ilmiah dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu fenomena yang makin mengkhawatirkan adalah penyebaran hoaks terkait sediaan farmasi dan makanan, yang tidak jarang menimbulkan kepanikan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga resmi seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kediri dan produk lokal dalam negeri. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas tugas pengawasan dan komunikasi publik Balai POM. Beberapa bentuk ancaman yang ditimbulkan antara lain :

- Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Produk dan Regulasi Hoaks tentang “obat berbahaya”, “vaksin yang mengandung zat terlarang”, atau “produk makanan yang diklaim mengandung bahan kimia” seringkali membuat masyarakat ragu terhadap produk yang sebenarnya aman dan telah lolos pengawasan. Hal ini dapat merusak reputasi lembaga pengawas dan menghambat upaya edukasi publik.
- Gangguan terhadap Efektivitas Pengawasan
Ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh isu hoaks dibandingkan informasi resmi, upaya pengawasan dan penegakan hukum oleh Balai POM menjadi kurang efektif. Masyarakat bisa jadi lebih mempercayai sumber informasi tidak kredibel yang viral di media sosial.
- Percepatan Penyebaran Informasi Palsu melalui Media Sosial
Platform digital seperti WhatsApp, TikTok, dan Facebook menjadi lahan subur bagi berita hoaks karena kemudahan berbagi informasi tanpa verifikasi. Tantangan besar muncul bagi Balai POM untuk melawan misinformasi yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
- Potensi Konflik dan Mispersepsi terhadap Kebijakan Pemerintah
Hoaks juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan pengawasan pangan dan obat, bahkan menimbulkan resistensi masyarakat terhadap program edukasi keamanan pangan dan obat.
Sebagai bentuk mitigasi, Balai POM di Kediri dapat mengoptimalkan beberapa langkah strategis :
 - Memperkuat komunikasi publik berbasis data dan bukti ilmiah, dengan menghadirkan konten edukatif yang mudah dipahami dan menarik.
 - Membangun kolaborasi dengan media massa dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan informasi yang benar.

- Meningkatkan kehadiran di media sosial resmi agar masyarakat memiliki sumber rujukan terpercaya ketika menghadapi isu-isu yang beredar.
- Melibatkan influencer kesehatan, tenaga medis, dan akademisi lokal untuk menjadi agen penyampai pesan yang kredibel.

4. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular

Penyakit tidak menular diantaranya penyakit akibat pola makan, yaitu Diabetes Melitus, Hiperkolesterol dan Hipertensi semakin meningkat di masyarakat. Pola makan tersebut terkait erat dengan makanan yang dikonsumsi, oleh sebab itu Badan POM RI melakukan pengawasan kandungan Gula, Garam, Lemak (GGL) pada produk pangan melalui kegiatan sampling dan pengujian produk pangan serta mewajibkan produsen pangan untuk mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) pada label kemasan pangan yang diproduksi.

5. Resistensi Antimikroba (AMR Issue)

Angka penyerahan antibiotik di wilayah kerja Balai POM di Kediri masih cukup tinggi yaitu 72%. Balai POM di Kediri melalui pengawasan sarana pelayanan kefarmasian melakukan penertiban terkait peredaran antibiotik di masyarakat dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Apoteker Penanggung Jawab sarana pelayanan kefarmasian terkait Anti Mikroba Resistance (AMR). Mengembalikan aturan tentang penyerahan obat keras dengan resep dokter merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kediri, dibutuhkan kerjasama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Balai POM di Kediri melakukan penertiban dengan memulainya dari fokus penyerahan antibiotik ke pasien karena penyerahan antibiotik yang tidak terkendali menyebabkan Anti Mikroba Resistance (AMR) yang berdampak pada angka kesembuhan dan kesehatan Nasional, serta membebani keuangan negara jika penyembuhan penyakit akibat infeksi mikrobial sulit untuk disembuhkan.

6. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor

Budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat di wilayah Kediri khususnya, masih kuat dipengaruhi oleh pola pikir paternalistik yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini membuat ruang partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam sektor obat dan makanan, menjadi kurang diperhatikan. Padahal, perempuan memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha rumahan, terutama pada produksi pangan olahan, yang dapat berkontribusi signifikan bagi peningkatan ekonomi keluarga maupun perekonomian lokal.

Ketimpangan ini tidak hanya membatasi kesempatan perempuan untuk mengembangkan kapasitas dan perannya, tetapi juga berdampak pada rendahnya literasi keamanan pangan pada kelompok pelaku usaha perempuan yang sebenarnya sangat strategis dalam rantai produksi pangan. Keadaan tersebut menjadi ancaman bagi efektifitas program-program Balai POM di Kediri karena menghambat upaya peningkatan kesadaran dan praktik keamanan pangan yang seharusnya melibatkan peran perempuan sebagai salah satu motor penggerak di tingkat rumah tangga dan komunitas.

7. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG

Dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi untuk Keluarga (MBG) yang berskala nasional, terdapat potensi meningkatnya risiko terjadinya insiden atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Risiko tersebut dapat terjadi karena :

- Program MBG melibatkan rantai proses yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat
- Belum seragamnya penerapan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah
- Pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan dan penanganan bahan yang tidak sesuai standar keamanan pangan.

- Belum optimalnya kesiapan laboratorium Balai POM di Kediri dalam melakukan pengujian sampel terkait KLB, sehingga proses konfirmasi dan penanganan insiden dapat mengalami keterlambatan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan langsung oleh penerima manfaat, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik, mengganggu proses pembelajaran, serta mengurangi legitimasi Program MBG sebagai agenda prioritas nasional.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, isu ini bukan sekadar tantangan teknis, melainkan juga ancaman strategis terhadap keberlanjutan dan ketahanan Program MBG. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan mutu pangan melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, serta berbasis risiko, disertai dengan penguatan kapasitas laboratorium.

Tabel 1.12 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths 1. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Balai POM di Kediri 2. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional 3. Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid 4. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat 5. Memiliki strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik 6. Komitmen Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM	Weakness 1. Kapasitas SDM belum memadai 2. Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM 3. Sarana Prasarana terkait infrastruktur TIK belum memadai 4. Koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi
Opportunity 1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2. Kolaborasi strategis dengan stakeholder baru	Threats 1. Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2. Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan 3. Maraknya penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

3. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan 5. BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor 7. Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diarusutamakan	4. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular 5. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) 6. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor 7. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG
---	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Kediri dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

1.2 Visi BPOM 2025-2029

Balai POM di Kediri sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan dibidang Obat dan Makanan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu :

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi Badan POM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia yang sehat diantara produsen dalam negeri maupun dikanca internasional.

Visi Badan POM untuk periode 2025–2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman : Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Badan POM. Hal ini mencakup pengawasan terhadap produk legal, produksi yang memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta pengendalian cepat terhadap produk ilegal atau berisiko melalui sistem pengawasan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu : Badan POM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi formulasi, proses produksi, hingga pemenuhan standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing : Badan POM mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan pembinaan, fasilitasi sertifikasi, dan peningkatan mutu serta inovasi.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera : Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi Balai POM di Kediri periode 2025–2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pengawasan yang terpercaya, efektif, dan adaptif terhadap tantangan global, serta pemberdayaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi BPOM 2025-2029

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan empat (4) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM secara utama mendukung Asta Cita 4, yaitu:

“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”

BPOM juga mendukung pada Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8.

Memperhatikan hal tersebut, maka misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi

semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas

tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Kediri, sesuai dengan tugas dan fungsinya, mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM dalam rangka mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif serta berdaya guna bagi masyarakat.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang Kuat terhadap UMKM : Tujuan ini

menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif, dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima : Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai POM di Kediri sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Selanjutnya, untuk mengukur capaian tujuan tersebut, tabel indikator tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra BPOM 2025–2029 dimasukkan secara utuh dalam dokumen Renstra Balai POM di Kediri sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu					
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Index RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Kediri, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Kediri akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis

data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan

perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase

Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Kediri periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Farmasi dan Pangan Olahan		Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator:	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
bersama seluruh pemangku kepentingan	Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis yang dituangkan dalam sasaran kegiatan di Balai POM Kediri. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Kediri sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran	Fungsi Pemeriksaan
		Terdapat keputusan/rekomendasi dari pusat atau lintas sektor yang belum ditindaklanjuti	a. Menyusun monev daftar rekomendasi dan melakukan monitor status progressnya (open, in progress atau closed) b. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan unit pusat atau lintas sektor terkait	Fungsi Pemeriksaan; Fungsi Sertifikasi

		Tidak updatenya database sarana distribusi dan produksi Obat dan Makanan	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja	
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	
		Meningkatnya jumlah kasus KLB KP secara nasional.	Koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Sarana produksi pangan fortifikasi telah berhenti beroperasi sehingga tidak dapat diperiksa	Membuat perencanaan pelaksanaan inspeksi sarana produksi	Fungsi Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Publikasi terkait Informasi Keamanan Obat dan makanan belum merata dan belum dapat dipahami oleh seluruh masyarakat	Pelaksanaan KIE merata sesuai Target dan terjadwal	Fungsi Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Terjadinya kesalahan pemilihan KBLI pada saat pengajuan PB UMKU IP-CPPOB	Mengadakan bimtek untuk para pelaku usaha	Fungsi Sertifikasi
		Kompetensi petugas sertifikasi tidak merata	Melakukan <i>sharing session</i> dan	

		untuk semua komoditas	sebagai observer saat sertifikasi <i>cross commodity</i>	
		Rendahnya literasi digital masyarakat dalam registrasi pangan olahan	Melakukan program pendampingan UMKM	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terjadinya tuntutan hukum dari pihak tersangka	Melakukan penindakan sesuai prosedur dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Fungsi Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Semakin maraknya produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang diedarkan melalui media online	a. Penguatan kegiatan pengawasan cyber patrol dan pemantauan transaksi online secara berkala melalui marketplace dan media sosial. b. Membangun kerja sama dan koordinasi dengan platform e-commerce, Ditjen PSE, Kominfo, Kepolisian, dan lintas sektor lainnya untuk tindak lanjut cepat (takedown dan penindakan).	Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Pengaduan rujukan yang masuk dari UPT lain pada simpellpk tidak ternotifikasi dan notifikasi yang muncul bercampur seluruh UPT BPOM	Melakukan Monitoring pengaduan melalui rujukan masuk dari Unit Pusat dan upt lain pada akun Simpellpk	Fungsi Infokom

8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kelengkapan dan kesesuaian dokumen keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	Melakukan audit keuangan internal setahun sekali terhadap tahun sebelumnya (n-1)	Fungsi Tata Usaha
		Kerusakan gedung kantor Balai POM di Kediri	Perbaikan dan perawatan gedung	
		Kerusakan peralatan perkantoran	Perawatan peralatan perkantoran	
		Kehilangan Aset Barang Milik Negara	1. Pemasangan CCTV 2. Satpam berjaga selama 24 jam 3. Stok opname secara berkala 4. Rekonsiliasi DBR, BAST-BMN dengan staf penanggungjawab bersama pemegang BMN secara berkala 5. Pembuatan monitoring mutasi BMN	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

- a. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan

- cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- b. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
 - c. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
 - d. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 - e. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
 - f. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
 - g. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kediri

Balai POM di Kediri mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Penyusunan strategi Balai POM di Kediri tahun 2025 - 2029 dalam melaksanakan kebijakan BPOM merupakan hasil dari analisis SWOT Balai POM di Kediri. Adapun strategi Balai POM di Kediri tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

Strategi Balai POM di Kediri 2025-2029 :

- a. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta farmakovigilans termasuk Program Makan Bergizi Gratis melalui pemeriksaan sarana dan produk secara berkelanjutan termasuk yang tidak berizin dengan meningkatkan Kerjasama lintas sektor yang aktif dan jaringan kerjasama yang solid, melakukan kolaborasi strategis dengan stakeholder baru, serta dengan memenuhi kebutuhan akan jumlah / kapasitas SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan pengawasan.
- b. Balai POM di Kediri melakukan kolaborasi strategis dengan lintas sektor terkait terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan melakukan koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi
- c. Memperkuat fungsi penindakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di BPOM di Kediri dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi

SDM pengawasan obat dan makanan, melakukan pemanfaatan teknologi dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

- d. Balai POM di Kediri melakukan intensifikasi pembinaan dan pendampingan melalui kegiatan desk, layanan konsultasi baik di kantor maupun di Mall Pelayanan Publik yang dilakukan baik tatap muka langsung maupun daring serta bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait.
- e. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM dalam melakukan pengelolaan strategi dan saluran komunikasi dan informasi publik baik internal dan eksternal, serta memelihara ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan seperti komunitas sekolah aman, pasar aman dan desa pangan aman.
- f. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui Forum Komunikasi dan Penyebaran Informasi seputar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- g. Penguatan kerja sama lintas sektor dan jaringan kerjasama yang solid serta kolaborasi aktif dengan stakeholder baru dalam hal pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- h. Pemenuhan kapasitas SDM yang kompeten dan professional, pemenuhan sarana prasarana perkantoran termasuk infrastruktur TIK terkini, peningkatan dan pemenuhan kapabilitas laboratorium Balai POM di Kediri.
- i. Peningkatan kompetensi SDM dalam analisis/pengolahan data dan digitalisasi dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta dukungan terhadap pemenuhan ketersediaan alat pengolah data yang memadai.
- j. Pemanfaatan teknologi dan inovasi oleh tim Reformasi Birokrasi Balai POM di Kediri untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Kediri.
- k. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola penggunaan alokasi / pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kediri 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket dan post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta farmakovigilans termasuk Program Makan Bergizi Gratis melalui pemeriksaan sarana dan produk secara berkelanjutan termasuk yang tidak berizin dengan meningkatkan Kerjasama lintas sektor yang aktif dan jaringan kerjasama yang solid, melakukan kolaborasi strategis dengan stakeholder baru, serta dengan memenuhi kebutuhan akan jumlah / kapasitas SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan pengawasan. 2. Balai POM di Kediri melakukan kolaborasi strategis dengan lintas sektor terkait terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan melakukan koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>.	1. Memperkuat fungsi penindakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di BPOM di Kediri dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan, melakukan pemanfaatan teknologi dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	1. Balai POM di Kediri melakukan intensifikasi pembinaan dan pendampingan melalui kegiatan desk, layanan konsultasi baik di kantor maupun di Mall Pelayanan Publik yang dilakukan baik tatap muka langsung maupun daring serta bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	1. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM dalam melakukan pengelolaan strategi dan saluran komunikasi dan informasi publik baik internal dan eksternal, serta memelihara ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan seperti komunitas sekolah aman, pasar aman dan desa pangan aman. 2. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui Forum Komunikasi dan Penyebaran Informasi seputar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di	1. Penguatan kerja sama lintas sektor dan jaringan kerjasama yang solid serta

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	kolaborasi aktif dengan stakeholder baru dalam hal pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	1. Pemenuhan kapasitas SDM yang kompeten dan professional, pemenuhan sarana prasarana perkantoran termasuk infrastruktur TIK terkini, peningkatan dan pemenuhan kapabilitas laboratorium Balai POM di Kediri. 2. Peningkatan kompetensi SDM dalam analisis/pengolahan data dan digitalisasi dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta dukungan terhadap pemenuhan ketersediaan alat pengolah data yang memadai.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	1. Pemanfaatan teknologi dan inovasi oleh tim Reformasi Birokrasi Balai POM di Kediri untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Kediri. 2. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola penggunaan alokasi / pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Kediri juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas Balai POM di Kediri yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Kediri melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Kediri mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja

sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Kediri tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Balai POM di Kediri

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin sebagai upaya dalam pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Kediri termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, Balai POM di Kediri menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama dan target yang tercantum dalam matriks yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Kediri selama periode lima tahun.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83	84,13	85,25	86,50	87,75
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	89	91	93	95
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	93	94	95	96	97
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	95,67	96,33	97	97,67

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,25	93,25	94,25	95,25	96,00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90,80	92,40	94,00	95,60	96,80
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	16	19	22	25
		15	Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	16,67	33,33	50	66,67	83,33
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasa	17	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa	67	73	80	87	87

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	n Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	85,21	86,05	86,90	87,74
		19	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	6	6	6	8
		20	Jumlah Desa Pangan Aman	1	2	3	3	3
		21	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	12,82	33,33	53,85	76,92	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di UPT	82	83	84	85	86
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
7	Layanan Publik UPT yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	76,50	78	79,50	81
		27	Nilai AKIP UPT BPOM	78,55	79,30	80,05	80,80	81,55
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3	3	3	3

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan target kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Kediri periode 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20.427,653	26.707,660	29.407,344	32.748,328	41.007,168
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.825,410	4.813,421	5.209,711	5.640,277	5.910,489
Total	24.253,063	31.521,081	34.617,055	38.388,605	46.917,657

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	24.253,063	31.521,081	34.617,055	38.388,605	46.917,657
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai POM di Kediri tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan Rencana Strategis Badan POM dan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra Balai POM di Kediri 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Balai POM di Kediri.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi, dan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam melakukan analisa resiko untuk menentukan kebijakan yang diambil di lingkungan Balai POM di Kediri. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaharui, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media online.

Pimpinan Balai POM di Kediri memiliki tanggung jawab esensial dalam menetapkan dan mengawal rancangan strategis ini, sehingga dapat mengarahkan institusi ke pencapaian hasil yang maksimal. Renstra Balai POM di Kediri tahun 2025-2029 diharapkan dapat mencerminkan komitmen UPT Balai POM di Kediri untuk berkontribusi secara signifikan pada capaian organisasi Badan POM secara khusus dan pembangunan nasional di sektor kesehatan secara umum.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI KEDIRI TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kediri									24.253,063	31.521,081	34.617,055	38.388,605	46917,657	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									20.427,653	26.707,660	29.407,344	32.748,328	41.007,168	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	83	84.13	85.25	86.50	87.75						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Kediri	26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	87	89	91	93	95						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Kediri	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai POM di Kediri	93	94	95	96	97						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	95	95.67	96.33	97	97.67						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	92.25	93.25	94.25	95.25	96.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	80	82	84	87	90						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	90.80	92.40	94.00	95.60	96.80						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Kediri	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Kediri	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Kediri	14	16	19	22	25						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Kediri	16.67	33.33	50	66.67	83.33						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri		81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			70	75	85	95	100						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			177	183	192	203	212						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			72	77	81	85	90						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			158	210	228	246	266						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM				144	144	144	144						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar				995	995	995	995						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Kediri	67	73	80	87	87						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			10	11	12	13	13						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Kediri	84.37	85.21	86.05	86.90	87.74						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Kediri	4	6	6	6	8						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Kediri	1	2	3	3	3						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Kediri	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			95	300	360	432	518						UPT BPOM
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			19	9	10	11	12						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			4	6	6	6	8						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman			1	2	3	3	3						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	1						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)						
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM	
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai POM di Kediri	12.82	33.33	53.85	76.92	100							UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			5	8	8	9	9							UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Kediri	82	83	84	85	86							UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			2	2	2	2	3							UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi														UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Kediri	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Kediri	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			55	67	71	72	81						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Kediri	75	76.50	78	79.50	81						UPT BPOM
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Kediri	78.55	79.30	80.05	80.80	81.55						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Kediri	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Kediri	3	3	3	3	3						UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			7	7	7	7	7						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									3.825,410	4.813,421	5.209,711	5.640,277	5.910,489	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran			1	1	1	1	1						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"												